



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja, produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, perlu diberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP-ASN);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Peraturan Pemerintah yang menjadi pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah belum ditetapkan maka Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah tanggal 21 Desember 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

R M K

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

FM

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);



17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 01);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah.
10. Staf Ahli adalah Pejabat Struktural Eselon II.b berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada bupati sesuai keahliannya.
11. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Unit Kerja pada RSUD Mas Amsyar Kasongan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
12. Jabatan adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain, dan yang pelaksanaannya membutuhkan kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan.
13. Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Calon Pegawai ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan yang sedang menjalani masa percobaan.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap dan atau sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan jangka waktu tertentu oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
15. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan/penugasan adalah Pegawai Negeri Sipil berasal dari Instansi luar Kabupaten Katingan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
16. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional pada perangkat daerah yang merupakan hasil evaluasi jabatan.
17. *Basic* TPP adalah Jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diperoleh dari parameter kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
18. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP-ASN adalah Pemberian tambahan penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Katingan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
19. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah kurun waktu 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan.
20. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan perangkat daerah.

fy. h

23. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan/Kelurahan.
24. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
25. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
26. Hadir Kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan.
27. Gaji atau Upah adalah hak pegawai negeri sipil yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari prestasi dan beban kerja.
28. Pejabat Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Penanggung Jawab adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
30. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
32. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
33. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
34. Surat Perintah Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
35. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
36. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
37. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah berdasarkan SPM.
38. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
39. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
40. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang/Kepala Perangkat Daerah karena pejabat definitif tidak dapat melaksanakan tugas/berhalangan tetap.

ky. k

41. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang/Kepala Perangkat Daerah karena pejabat definitif tidak dapat melaksanakan tugas/berhalangan sementara.
42. Sekolah Kedinasan adalah lembaga pendidikan yang melatih calon pegawai negeri sipil atau calon anggota dinas tertentu. Sekolah kedinasan memiliki tujuan untuk menghasilkan individu yang kompeten dan terampil dalam bidang-bidang yang diperlukan dalam administrasi pemerintahan atau instansi lainnya dan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian/Badan dengan pola ikatan dinas dan/atau pola pembibitan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud pemberian TPP adalah untuk meningkatkan dan memotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Tujuan pemberian TPP adalah untuk :

- a. Meningkatkan disiplin;
- b. Meningkatkan produktivitas kerja;
- c. Meningkatkan kinerja;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan, dan
- e. Meningkatkan kesejahteraan.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TPP-ASN
Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP-ASN.
- (2) Kriteria TPP-ASN Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan:
 - a. Beban kerja;
 - b. Prestasi kerja;
 - c. Tempat bertugas;
 - d. Kondisi kerja;
 - e. Kelangkaan profesi; dan
 - f. Pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Penetapan Besaran Basic TPP-ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan.
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah.
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.Besaran Basic TPP-ASN Pemerintah Daerah diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut :



= (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per Kelas Jabatan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

- (4) Perhitungan akhir besaran TPP-ASN dilakukan dengan penjumlahan dari total perkalian antara Basic TPP-ASN Pemerintah Daerah dengan Kriteria TPP-ASN sebagaimana pada Pasal 4 ayat (2).
- (5) Kelas Jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan dengan kriteria-kriteria terdiri dari faktor jabatan struktural dan faktor jabatan fungsional, Kelas Jabatan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Tim Pelaksanaan TPP-ASN Pemerintah Daerah mengklasifikasi Pejabat/Unit Kerja Perangkat Daerah kedalam kriteria TPP-ASN berdasarkan sebagaimana pada Pasal 4 ayat (2).
- (7) Tim Pelaksanaan TPP-ASN Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim.
 - b. Inspektur selaku Anggota Tim.
 - c. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selaku Anggota Tim.
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan selaku Anggota Tim
 - e. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Anggota Tim.
 - f. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selaku Anggota Tim.
 - g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku Anggota Tim.
- (8) Tim Pelaksanaan TPP-ASN Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Kelompok jabatan dan besaran TPP-ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) TPP-ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Tugas melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni pelaksanaan tugas pokok yang melampaui volume kerja dan waktu kerja efektif.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi.
- (4) Besaran persentase TPP-ASN berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP-ASN.

Pasal 6

- (1) TPP-ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovatif.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai ASN berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki Prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (3) Besaran persentase TPP-ASN berdasarkan Prestasi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP-ASN.

FA h

Pasal 7

- (1) TPP-ASN berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas berada di Daerah dengan tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil/sangat terpencil.
- (2) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada tenaga penyuluh, tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang bertugas di daerah terpencil/sangat terpencil.
- (3) Besaran persentase TPP-ASN berdasarkan Tempat Bertugas paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran basic TPP-ASN apabila indeks TPP-ASN tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).

Pasal 8

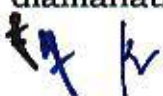
- (1) TPP-ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi.
- (2) Kriteria TPP-ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) di atas sebagai berikut :
 - a. Perkerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular (Petugas Kesehatan rentan penyakit)
 - b. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif (Radiografer)
 - c. Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja (
 - d. Pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
 - e. Pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. Pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran persentase TPP-ASN berdasarkan Kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP-ASN.

Pasal 9

- (1) TPP-ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas pegawai ASN yang memiliki keterampilan khusus dan kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang memenuhi pekerjaan tersebut.
- (2) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tinggi di Pemerintah Daerah.
- (3) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) meliputi Sekretaris Daerah dan Pegawai ASN yang bekerja sebagai Dokter Spesialis.
- (4) Besaran persentase TPP-ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi minimal 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP-ASN.

Pasal 10

- (1) TPP-ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan;



- (2) Besaran persentase TPP-ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP-ASN.

BAB IV
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
Pasal 11

- (1) Pemberian TPP-ASN setiap bulan kepada Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN dinilai berdasarkan :
- a. Produktivitas Kerja; dan
 - b. Disiplin Kerja.
- (2) Pemberian TPP-ASN sebagaimana pada Pasal 11 ayat (1) dibayar berdasarkan pada :
- a. Penilaian Produktivitas Kerja sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari Besaran TPP-ASN yang diterima setiap bulannya.
 - b. Penilaian Disiplin Kerja sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Besaran TPP-ASN yang diterima setiap bulannya.

Pasal 12

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja terdiri dari Sasaran Kinerja Pegawai dan Evaluasi Kinerja Pegawai sesuai Perjanjian Kinerja yang dituangkan pada Aplikasi E-Kinerja untuk setiap bulannya.
- (2) Capaian Sasaran Kinerja Pegawai dan Evaluasi Kinerja Pegawai dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), berupa predikat kinerja pegawai hasil penilaian Rating Hasil Kerja dan penilaian Rating Perilaku Kerja.
- (3) Hasil Penilaian Predikat Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) ditetapkan dengan persentase sebagai berikut :
- a. Sangat Baik dan Baik dihitung 100 % (seratus persen);
 - b. Butuh Perbaikan dihitung 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. Kurang dihitung 50 % (lima puluh persen);
 - d. Sangat Kurang dihitung 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Perjanjian Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai dan Evaluasi Kinerja Pegawai hasil cetak/print out pada Aplikasi E-Kinerja masing-masing Pegawai ASN contoh hasil cetak/Print Out sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Penilaian Disiplin Kerja dan Formulir pemberian TPP-ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Nilai Dasar TPP-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (7) Besaran TPP-ASN bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (8) Besaran TPP-ASN bagi Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (9) Besaran TPP-ASN bagi Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

RM

- (10) Besaran TPP-ASN bagi Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (11) Besaran TPP-ASN bagi Jabatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan Rekapitulasi Kehadiran Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN setiap bulannya.
- (2) Kehadiran Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN dihitung pada saat Masuk Kerja dan Pulang Kerja.
- (3) Rekapitulasi Kehadiran sebagaimana pada ayat (1), Kehadiran Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN berdasarkan hasil mesin absensi elektronik dan atau manual pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) TPP-ASN hanya diberikan kepada Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang namanya tercantum dalam daftar gaji pada Pemerintah Kabupaten Katingan.
- (2) Pegawai pindahan atau mutasi dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Kabupaten Katingan dalam tahun anggaran berjalan yang namanya telah tercantum dalam daftar gaji, dapat diberikan TPP-ASN sepanjang anggaran tersedia.
- (3) Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menduduki jabatan yang namanya tercantum dalam daftar gaji Pemerintah Daerah diberikan TPP-ASN.
- (4) Calon Pegawai ASN diberikan TPP-ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP-ASN kelas jabatannya sampai dengan terbitnya Keputusan Pengangkatan dari Calon Pegawai ASN menjadi Pegawai ASN.
- (5) Pemberian TPP bagi Calon Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Dalam hal belum ditetapkannya Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada Peta Jabatan, maka TPP-ASN terhadap Calon Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) maka kepada Calon Pegawai ASN tersebut diberikan 100% (seratus persen) dari nilai TPP-ASN Kelas Jabatan terendah sesuai jenis jabatan (Jabatan Fungsional/Jabatan Fungsional Tertentu) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diberikan TPP-ASN yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

TPP-ASN tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata secara sah tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah.
- b. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan.



- c. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- d. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan Cuti diluar tanggungan negara (CLTN) atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- e. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berstatus terpidana yang berkekuatan hukum tetap.
- f. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah menjalani hukuman kurungan penjara.
- g. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah menjalani Tugas Belajar.
- h. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan yang diperbantukan/dipekerjakan pada Instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten Katingan.

Pasal 16

Bagi Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN yang sedang melaksanakan Cuti selain Cuti diluar tanggungan negara (CLTN) tetap diberikan TPP-ASN setiap bulannya berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2).

Pasal 17

Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN yang melaksanakan tugas khusus seperti melakukan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, mengikuti sosialisasi, pendidikan pelatihan kedinasan dalam kota dan mengikuti rapat dinas tetap dinilai hadir walaupun tidak mengisi alat atau mesin absensi elektronik atau manual, dibuktikan dengan Surat Tugas atau Surat Perintah Tugas dan Nota Kedinasan lainnya.

BAB V PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA Pasal 18

- (1) Pengurangan TPP-ASN diberlakukan kepada Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN apabila :
 - a. Tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
 - 1) Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan.
 - 2) Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - b. Terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
 - 1) Keterlambatan (TL 1) dengan lama keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (kurang dari tiga puluh satu menit), dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
 - 2) Keterlambatan (TL 2) dengan lama keterlambatan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (kurang dari enam puluh satu menit), dikurangi sebesar 1% (satu persen).

FAK

- 3) Keterlambatan (TL 3) dengan lama keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (kurang dari sembilan puluh satu menit), dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen).
 - 4) Keterlambatan (TL 4) dengan lama keterlambatan \geq 91 (lebih dari sama dengan sembilan puluh satu) menit, dikurangi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- c. Pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
- 1) Pulang sebelum waktu (PSW 1) dengan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya mulai dari 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (kurang dari tiga puluh satu menit), dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
 - 2) Pulang sebelum waktu (PSW 2) dengan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya mulai dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (kurang dari enam puluh satu menit), dikurangi sebesar 1% (satu persen).
 - 3) Pulang sebelum waktu (PSW 3) dengan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya mulai dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (kurang dari sembilan puluh satu menit), dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen).
 - 4) Pulang sebelum waktu (PSW 4) dengan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya mulai dari \geq 91 (lebih dari sama dengan sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor, dikurangi sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen).
- (2) Apabila Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN tidak mengikuti Apel pada hari Senin Pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan nilai TPP-ASN sebesar 2% (dua persen) kecuali untuk tugas luar, perintah atau izin dari pimpinan yang bersifat mendesak dan dibuktikan dengan disposisi dari pimpinan, surat tugas, undangan dan/atau bukti pendukung lainnya yang sah.
 - (3) Bagi Perangkat Daerah yang memiliki ketentuan jadwal/jam kerja tertentu, terhadap Pegawainya yang melakukan pelanggaran disiplin, tetap diberlakukan Pemotongan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).
 - (4) Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dan tidak mentaati jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja tidak dibayarkan pada bulan berikutnya terhadap Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN.
 - (5) Apabila Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN terbukti tidak masuk kerja sebelum atau sesudah Hari Libur dan Cuti Bersama tanpa alasan yang sah dikenakan pengurangan nilai TPP-ASN sebesar 100% (seratus persen) pada bulan berkenaan.

Pasal 19

- (1) TPP-ASN diberikan mempertimbangkan kepatuhan terhadap penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pegawai ASN sebagai Penyelenggara Negara/Wajib Laport sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila Pegawai ASN sebagai Penyelenggara Negara/Wajib Laport tidak patuh sebagaimana Pasal 18 ayat (1) maka pembayaran TPP-ASN dikurangi sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai dengan Pegawai ASN tersebut menyampaikan bukti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Inspektorat Kabupaten Katingan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan.

ky k

- (3) Apabila Pegawai ASN belum mengembalikan Barang Milik Daerah (MD) kepada Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang maka pembayaran TPP-ASN dikurangi sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai dengan Pegawai ASN tersebut menyampaikan bukti tertulis telah mengembalikan Barang Milik Daerah (MD) tersebut kepada Inspektorat Kabupaten Katingan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan.
- (4) Apabila Pegawai ASN belum menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang Milik Daerah (MD) kepada Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang maka pembayaran TPP-ASN dikurangi sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai dengan Pegawai ASN tersebut menyampaikan bukti tertulis telah mengembalikan Barang Milik Daerah (MD) tersebut kepada Inspektorat Kabupaten Katingan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 20

- (1) TPP-ASN dibayarkan untuk sebanyak 12 (dua belas) bulan untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1), pembayaran TPP ASN terhadap Pegawai ASN yang bekerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, pembayaran TPP ASN disesuaikan dengan jumlah bulan selama Pegawai ASN berstatus Pegawai ASN Daerah.
- (3) Daftar perhitungan uang TPP-ASN untuk Pejabat Eselon II pada Sekretariat Daerah disahkan oleh Sekretaris Daerah, sedangkan untuk PD disahkan oleh Kepala PD/Unit Kerja.

Pasal 21

- (1) Khusus penghitungan sebagaimana dalam Pasal 19 bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (2) Pembayaran pada bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
- (2) Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN golongan I dan II dikenakan tarif pajak sebesar 0 % (nol persen);
 - b. Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN golongan III dikenakan tarif pajak sebesar 5 % (lima persen); dan
 - c. Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN golongan IV dikenakan tarif pajak sebesar 15 % (lima belas persen).
- (3) Bagi Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagai berikut:
 - a. Golongan I dan II dikenakan tarif pajak sebesar 0 % (nol persen);
 - b. Golongan III dikenakan tarif pajak sebesar 6 % (enam persen); dan
 - c. Golongan IV dikenakan tarif pajak sebesar 18 % (delapan belas persen).

BAB VII
PENGELOLA DATA
Pasal 23

- (1) Setiap PD harus menyusun rekapitulasi hasil penilaian produktivitas kerja dan hasil penilaian disiplin kerja setiap bulan dimulai pada hari akhir bulan .
- (2) Setiap Kepala PD harus mengesahkan untuk bahan pengajuan TPP-ASN setiap bulan paling lambat akhir bulan;
- (3) Kepala PD harus mengajukan SPP dan SPM TPP kepada Kepala PD yang menangani urusan pengelolaan keuangan daerah setiap bulan paling lambat akhir bulan.
- (4) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus menerbitkan SP2D TPP setiap bulan paling lambat pada akhir bulan.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan data TPP pada PD dilaksanakan oleh satuan unit kerja yang menangani urusan bidang kepegawaian berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan.
- (2) Bidang yang menangani urusan kepegawaian pada PD mempunyai tugas :
 - a. Menghimpun, menyusun, menghitung, merekapitulasi dan mengarsipkan daftar kehadiran seluruh Pegawai dari hasil input mesin rekam kehadiran elektronik atau manual.
 - b. Mengonfirmasi Pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik atau manual karena alasan kedinasan.
 - c. Menghimpun, menyusun, menghitung, merekapitulasi dan mengarsipkan rekapitulasi hasil penilaian produktivitas kerja dan hasil penilaian disiplin kerja seluruh Pegawai.
- (3) Bidang yang menangani urusan keuangan pada PD mempunyai tugas :
 - a. Menerima rekapitulasi rekapitulasi hasil penilaian produktivitas kerja dan hasil penilaian disiplin kerja bulanan untuk disahkan Kepala PD sebagai bahan pembayaran TPP-ASN
 - b. Mengajukan SPM TPP-ASN ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - c. Membayarkan TPP-ASN kepada setiap Pegawai di PD melalui rekening gaji masing-masing.
 - d. Bagi Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN yang belum memiliki rekening, Pembayaran TPP-ASN dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran.

Pasal 25

- (1) Setiap Pegawai wajib rekam kehadiran dengan menggunakan alat atau mesin rekam kehadiran elektronik atau manual pada masing-masing unit kerja.
- (2) Kewajiban rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas atau ditugaskan secara tetap dilapangan yang tidak memungkinkan untuk melakukan absensi pada PD tempat tugas sehingga diberikan dispensasi tetap tidak melaksanakan rekam kehadiran elektronik atau manual pada masa penugasan.
- (3) Bagi Pegawai pada PD yang belum memiliki alat atau rekam kehadiran elektronik, maka absensi kehadiran dilakukan secara manual.



- (4) Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pagi hari dan sore hari sesuai jam kerja yang ditentukan.
- (5) Apabila alat atau mesin rekam kehadiran elektronik tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis maka Kepala PD atau Unit Kerja membuat berita acara kerusakan alat atau mesin rekam kehadiran elektronik dan melampirkan daftar hadir Pegawai secara tertulis.

Pasal 26

- (1) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan memiliki tugas dan kewenangan untuk menggunakan Presensi kehadiran dan Hasil Penilaian Produktivitas Kerja yang disusun oleh PD atau Unit Kerja untuk kepentingan pembinaan pegawai.
- (2) Hasil rekapitulasi Penilaian Produktivitas Kerja dan Penilaian Disiplin Kerja wajib dilaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Katingan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan.

BAB VIII TIM MONITORING DAN EVALUASI Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap Presensi kehadiran dan Hasil capaian melaksanakan tugas, dan menangani pengaduan dari Pegawai yang dinilai maupun Pejabat yang menilai, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - b. Inspektorat.
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - d. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
 - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 28

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Calon PNS dan PNS yang menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas tambahan.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberi tugas tambahan dapat diberikan tambahan penghasilan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar dari TPP yang diterima setiap bulan.
- (4) Kelompok jabatan dan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB IX
TPP-ASN YANG DIANGKAT
Pj, PLH, DAN PLT
Pasal 29

- (1) Pegawai ASN yang diperintah/ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat (Pj) diberikan TPP-ASN tambahan, menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pegawai ASN yang diangkat sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah dalam waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP-ASN jabatan Sekretaris Daerah.
 - b. Pejabat Atasan Langsung atau Atasan Tidak Langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat (Pj) ditambah sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai TPP-ASN dalam jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat (Pj) pada jabatan yang dirangkapnya.
 - c. Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian atau Penjabat jabatan lain menerima TPP-ASN yang lebih tinggi, ditambah sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai TPP-ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
 - d. Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian atau Penjabat hanya menerima TPP-ASN pada Jabatan TPP-ASN yang tertinggi.
 - e. TPP-ASN tambahan sebagaimana ayat (1) diatas dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat (Pj).
- (2) Jika terjadi pergantian atau perubahan jabatan apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas diatas minggu ketiga bulan berkenaan maka pejabat baru tersebut menerima TPP-ASN dalam jabatan baru mulai bulan berikutnya.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

Untuk Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi diberikan pengecualian melakukan absensi elektronik/manual apabila ada perintah dari Pimpinan bersifat mendesak dan melaksanakan tugas lain yang tidak dapat diwakilkan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

- (1) Pembayaran TPP-ASN berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai dibayarkan bulan Januari.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan berikutnya atau dalam beberapa bulan secara sekaligus.

PAK

- (3) Dalam hal terdapat Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan/penugasan yang berasal dari luar Pemerintah Daerah, maka kepada yang bersangkutan harus memilih Tambahan penghasilan atau sebutan lainnya yang berasal dari instansi asalnya atau memilih TPP ASN Daerah.
- (4) Calon Pegawai ASN yang bekerja dan atau ditugaskan yang berasal dari lulusan Perguruan Tinggi/Sekolah Kedinasan dapat diberikan TPP-ASN Daerah sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari besaran TPP-ASN.
- (5) Ketentuan Tambahan penghasilan atau sebutan lainnya dan TPP-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak boleh diberikan secara bersamaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 609) dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 653), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 21 Maret 2024



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 21 Maret 2024



PRANSANG
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR 778

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

PERJANJIAN KINERA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN.....

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan, Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (OUTCOME)	SATUAN	TARGET	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA

NO	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN

PIHAK KEDUA,

Kasongan,.....
PIHAK PERTAMA,

NAMA PEGAWAI ASN YANG DINILAI
NIP.....

NAMA ATASAN
.....
BUPATI KATINGAN,
SAIFUL



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

CONTOH HASIL CETAKAN SASARAN KINERJA PEGAWAI PADA APLIKASI E-KINERJA

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. KATINGAN

PERIODE PENILAIAN:

NO		PEGAWAI YANG DINILAI		NO		PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA			1	NAMA		
2	NIP			2	NIP		
3	PANGKAT/ GOL. RUANG			3	PANGKAT/ GOL. RUANG		
4	JABATAN			4	JABATAN		
5	UNIT KERJA			5	UNIT KERJA		
HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI		RENCANA HASIL KERJA		ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
UTAMA							

CONTOH HASIL CETAKAN SASARAN KINERJA PEGAWAI PADA APLIKASI E-KINERJA

TAMBAHAN	
PERILAKU KERJA	
1 Berorientasi Pelayanan	
<ul style="list-style-type: none">- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan- Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
2 Akuntabel	
<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi- Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
3 Kompeten	
<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah- Membantu orang lain belajar- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
4 Harmonis	
<ul style="list-style-type: none">- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya- Suka menolong orang lain- Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
5 Loyal	
<ul style="list-style-type: none">- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara- Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
6 Adaptif	

CONTOH HASIL CETAKAN SASARAN KINERJA PEGAWAI PADA APLIKASI E-KINERJA

PERILAKU KERJA	
- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
7 Kolaboratif	
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Pegawai yang Dinilai

KASONGAN,
Pejabat Penilai Kinerja

Nama Pegawai
NIP.xxxxxxxxxxxxx

Nama Pegawai
NIP.xxxxxxxxxxxxx



CONTOH HASIL CETAKAN EVALUASI KINERJA PEGAWAI PADA APLIKASI E-KINERJA

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEBUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Pimpinan:
							Pimpinan:
							Pimpinan:
TAMBAHAN							
RATING HASIL KERJA							
PERILAKU KERJA						UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	
1	Berorientasi Pelayanan						
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 				Ekspektasi Khusus Pimpinan:		Pimpinan:
2	Akuntabel						
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 				Ekspektasi Khusus Pimpinan:		Pimpinan:
3	Kompeten						

CONTOH HASIL CETAKAN EVALUASI KINERJA PEGAWAI PADA APLIKASI E-KINERJA

PERILAKU KERJA		UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	
	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah- Membantu orang lain belajar- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Pimpinan:
4	Harmonis <ul style="list-style-type: none">- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya- Suka menolong orang lain- Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Pimpinan:
5	Loyal <ul style="list-style-type: none">- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara- Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Pimpinan:
6	Adaptif <ul style="list-style-type: none">- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas- Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Pimpinan:
7	Kolaboratif <ul style="list-style-type: none">- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Pimpinan:
RATING PERILAKU KERJA			
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI			

Pegawai yang Dinilai

Nama Pegawai
NIP Pegawai

KASONGAN,
Pejabat Penilai Kinerja

Nama Pegawai
NIP Pegawai



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT FORMULIR PENILAIAN DISIPLIN KERJA
(REKAPITULASI KEHADIRAN)

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Kelas Jabatan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Bulan :
Tahun :

NO	KRITERIA PENGURANGAN TPP-ASN	PERSENTASE PENGURANGAN	INPUT KEHADIRAN JAM/MENIT SELAMA 1 (SATU) BULAN	HASIL PERHITUNGAN KEHADIRAN PERJAM/MENIT	NILAI KEHADIRAN
1	Tidak Masuk Kerja (TK)	3%	0 Hari	0 Hari	0
2	Keterlambatan (TL-1)	0,5%	0 Jam 0 Menit	0 Menit	0
3	Keterlambatan (TL-2)	1%	0 Jam 0 Menit	0 Menit	0
4	Keterlambatan (TL-3)	1,25%	0 Jam 0 Menit	0 Menit	0
5	Keterlambatan (TL-4)	1,5%	0 Jam 0 Menit	0 Menit	0
6	Pulang Sebelum Waktu (PSW-1)	0,5%	0 Jam 0 Menit	0 Menit	0
7	Pulang Sebelum Waktu (PSW-2)	1%	0 Jam 0 Menit	0 Menit	0
8	Pulang Sebelum Waktu (PSW-3)	1,25%	0 Jam 0 Menit	0 Menit	0
9	Pulang Sebelum Waktu (PSW-4)	1,5%	0 Jam 0 Menit	0 Menit	0
JUMLAH HASIL PERHITUNGAN KEHADIRAN					0,00

KASONGAN,
PEJABAT PENILAI,
NAMA JABATAN

NAMA
NIP.



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT FORMULIR HASIL PERHITUNGAN
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

- Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Kelas Jabatan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Untuk Pembayaran pada
Bulan :
Tahun :
- A. Rincian Pembayaran TPP-ASN Perbulan :
1. Besaran TPP-ASN sesuai Jabatan :
Rp.....
2. Penilaian Produktivitas Kerja :
3. Penilaian Disiplin Kerja :
4. Hasil Akhir Penilaian (%) :
5. Besaran TPP-ASN Hasil Penilaian (Kotor) : Rp.....
- B. Pemotongan/Pengurangan :
1. PPH Gol. III 5% (lima persen) : Rp.....
2. PPH Gol. IV 15% (lima belas persen) : Rp.....
3. Tidak melaporkan LHKPN 50% (lima puluh persen) : Rp.....
4. Tidak mengembalikan BMD 50% (lima puluh persen) : Rp.....
5. Tidak menyelesaikan TPTGR 50% (lima puluh persen) : Rp.....
- C. Besaran TPP-ASN yang diterima perbulan (bersih) : Rp.....

PEGAWAI ASN YANG DINILAI,
NAMA JABATAN

NAMA
NIP.

KASONGAN,
PEJABAT PENILAI,
NAMA JABATAN

NAMA
NIP.



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

NILAI DASAR TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (TPP-ASN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

KELAS JABATAN	BESARAN (Rp)
1	948.441
2	1.199.101
3	1.449.760
4	1.754.616
5	2.960.491
6	3.549.880
7	4.085.072
8	4.633.197
9	5.764.552
10	6.626.771
11	7.618.323
12	9.853.934
13	12.323.557
14	13.730.842
15	18.036.395



LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 10 TAHUN 2024
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PECAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT DAERAH	ESELON	KELAS JABATAN	BASIC TPP	HEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	II.a	15	18.036.395	19.142.099			13.891.187	5.858.734	-	38.892.020
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	II.b	14	13.730.842	8.238.505			6.945.044		-	15.183.549
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	II.b	14	13.730.842	8.238.505			6.945.044		-	15.183.549
4	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	II.b	14	13.730.842	8.238.505			6.945.044		-	15.183.549
5	Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik	Sekretariat Daerah	II.b	13	12.323.577	8.517.123			2.555.137		-	11.072.260
6	Staf Ahli Bidang Kesejahteraan dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Daerah	II.b	13	12.323.577	8.517.123			2.555.137		-	11.072.260
7	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	II.b	13	12.323.577	8.517.123			2.555.137		-	11.072.260
8	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	III.a	12	9.853.934	3.941.574			2.868.720		-	6.810.294
9	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Sekretariat Daerah	III.a	12	9.853.934	3.941.574			2.868.720		-	6.810.294
10	Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Daerah	III.a	12	9.853.934	3.941.574			2.868.720		-	6.810.294
11	Kepala Bagian Sumber Daya Alam	Sekretariat Daerah	III.a	12	9.853.934	3.941.574			2.868.720		-	6.810.294
12	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	III.a	12	9.853.934	3.941.574			2.868.720		-	6.810.294
13	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	III.a	12	9.853.934	3.941.574			5.592.838		-	9.534.412
14	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	IV.a	8	4.633.197	3.682.432			1.921.269		-	5.603.701

MA

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT DAERAH	ESELON	KELAS JABATAN	BASIC TYP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF/LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Sekretariat Daerah	IV.a	8	4.633.197	3.682.432	-	-	1.921.269	-	-	5.603.701
16	Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	IV.a	9	5.764.552	3.585.620	-	-	2.390.413	-	-	5.976.033
17	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Daerah	III.a	12	9.853.934	3.941.574	-	-	2.868.720	-	-	6.810.294
18	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Sekretariat Daerah	IV.a	8	4.633.197	4.322.855	-	-	-	-	-	4.322.855
19	Kepala Subbagian Keuangan	Sekretariat Daerah	IV.a	9	5.764.552	3.585.620	-	-	796.804	-	-	4.382.424
20	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	Sekretariat Daerah	IV.a	8	4.633.197	4.322.855	-	-	-	-	-	4.322.855
21	Kepala Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah	III.a	12	9.853.934	3.941.574	-	-	2.868.720	-	-	6.810.294
22	Kepala Bagian Protokol, dan Komunikasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	III.a	12	9.853.934	3.941.574	-	-	2.868.720	-	-	6.810.294
23	Kepala Subbagian Protokol	Sekretariat Daerah	IV.a	8	4.633.197	3.682.432	-	-	640.423	-	-	4.322.855
24	Kepala Subbagian Komunikasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	IV.a	8	4.633.197	4.322.855	-	-	-	-	-	4.322.855
25	Kepala Subbagian Dokumentasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	IV.a	8	4.633.197	3.682.432	-	-	640.423	-	-	4.322.855
26	Kepala Bagian Perpustakaan dan Arsip	Sekretariat Daerah	III.a	12	9.853.934	3.941.574	-	-	2.868.720	-	-	6.810.294
27	Inspektur	Inspektorat	II.b	14	13.730.842	6.590.804	-	-	9.541.716	-	-	16.132.521
28	Sekretaris	Inspektorat	III.a	12	9.853.934	3.941.574	-	-	3.004.926	-	-	6.946.500
29	Inspektur Pembantu I	Inspektorat	III.a	11	7.618.323	5.265.208	-	-	1.579.562	-	-	6.844.770
30	Inspektur Pembantu II	Inspektorat	III.a	11	7.618.323	5.265.208	-	-	1.579.562	-	-	6.844.770
31	Inspektur Pembantu III	Inspektorat	III.a	11	7.618.323	5.265.208	-	-	1.579.562	-	-	6.844.770
32	Inspektur Pembantu Khusus	Inspektorat	III.a	11	7.618.323	5.265.208	-	-	1.579.562	-	-	6.844.770

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT DAERAH	ESELON	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Inspektorat	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	1,195,207	-	-	4,581,625
34	Kepala Subbagian Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Inspektorat	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	1,195,207	-	-	4,581,625
35	Sekretaris DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	II.b	14	13,730,842	6,453,496	-	-	5,883,138	-	-	12,336,633
36	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	III.a	11	7,618,323	5,265,208	-	-	1,053,042	-	-	6,318,250
37	Kepala Subbagian Rumah Tangga	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IV.a	9	5,764,552	4,262,904	-	-	-	-	-	4,262,904
38	Kepala Subbagian Kepegawaian, Perpustakaan dan Dokumentasi	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IV.a	8	4,633,197	4,226,792	-	-	-	-	-	4,226,792
39	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	III.a	11	7,618,323	5,265,208	-	-	1,053,042	-	-	6,318,250
40	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	III.a	11	7,618,323	5,265,208	-	-	1,053,042	-	-	6,318,250
41	Kepala	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	II.b	14	13,730,842	6,453,496	-	-	5,883,138	-	-	12,336,633
42	Sekretaris	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	III.a	12	9,853,934	3,941,574	-	-	2,732,515	-	-	6,674,088
43	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	IV.a	8	4,633,197	4,162,750	-	-	-	-	-	4,162,750
44	Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	796,804	-	-	4,183,223
45	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
46	Kepala Bidang Prasarana, Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
47	Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
48	Kepala Bidang Perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
49	Kepala Bidang Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
50	Kepala UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Mendawai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	IV.a	9	5,764,552	4,183,223	-	-	-	-	-	4,183,223

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT DAERAH	ESELON	KELAS JABATAN	RASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Mendawai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	IV.b	8	4,633,197	2,561,692	-	-	-	-	-	2,561,692
52	Kepala UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Petak Bahandang	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	IV.a	9	5,764,552	4,183,223	-	-	-	-	-	4,183,223
53	Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Petak Bahandang	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	IV.b	8	4,633,197	2,561,692	-	-	-	-	-	2,561,692
54	Kepala UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pendahara	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	IV.a	9	5,764,552	4,183,223	-	-	-	-	-	4,183,223
55	Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pendahara	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	IV.b	8	4,633,197	2,561,692	-	-	-	-	-	2,561,692
56	Kepala UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tumbang Hiran	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	IV.a	9	5,764,552	4,183,223	-	-	-	-	-	4,183,223
57	Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tumbang Hiran	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	IV.b	8	4,633,197	2,561,692	-	-	-	-	-	2,561,692
58	Kepala UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tumbang Samba	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	IV.a	9	5,764,552	4,183,223	-	-	-	-	-	4,183,223
59	Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tumbang Samba	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	IV.b	8	4,633,197	2,561,692	-	-	-	-	-	2,561,692
60	Kepala UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jaya Makmur	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	IV.a	9	5,764,552	4,183,223	-	-	-	-	-	4,183,223
61	Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jaya Makmur	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	IV.b	8	4,633,197	2,561,692	-	-	-	-	-	2,561,692
62	Kepala UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kasongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	IV.a	9	5,764,552	4,183,223	-	-	-	-	-	4,183,223
63	Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kasongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	IV.b	8	4,633,197	2,561,692	-	-	-	-	-	2,561,692
64	Kepala UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pendahara	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	IV.a	9	5,764,552	4,183,223	-	-	-	-	-	4,183,223
65	Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pendahara	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	IV.b	8	4,633,197	2,561,692	-	-	-	-	-	2,561,692
66	Kepala UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tumbang Kaman	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	IV.a	9	5,764,552	4,183,223	-	-	-	-	-	4,183,223

MA

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT DAERAH	ESELON	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tumbang Kaman	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	IV.b	8	4,633,197	2,561,692	-	-	-	-	-	2,561,692
68	Kepala UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tumbang Sanamang	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	IV.a	9	5,764,552	4,183,223	-	-	-	-	-	4,183,223
69	Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tumbang Sanamang	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	IV.b	8	4,633,197	2,561,692	-	-	-	-	-	2,561,692
70	Kepala	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II.b	14	13,730,842	6,453,496	-	-	5,883,138	-	-	12,336,633
71	Sekretaris	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	III.a	12	9,853,934	3,941,574	-	-	2,732,515	-	-	6,674,088
72	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV.a	8	4,633,197	4,162,750	-	-	-	-	-	4,162,750
73	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	796,804	-	-	4,183,223
74	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
75	Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
76	Kepala Bidang Pemerintahan dan Asst Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
77	Kepala	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II.b	14	13,730,842	6,453,496	-	-	5,883,138	-	-	12,336,633
78	Sekretaris	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	III.a	12	9,853,934	3,941,574	-	-	2,732,515	-	-	6,674,088
79	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	IV.a	8	4,633,197	4,162,750	-	-	-	-	-	4,162,750
80	Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	796,804	-	-	4,183,223

M.P.

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT DARRAH	ESELON	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan Gender dan Partisipasi Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
82	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
83	Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
84	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
85	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	IV.a	8	4,633,197	4,643,067	-	-	-	-	-	4,643,067
86	Kepala	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan	II.b	14	13,730,842	6,453,496	-	-	6,072,932	-	-	12,526,428
87	Sekretaris	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan	III.a	12	9,853,934	3,941,574	-	-	2,732,515	-	-	6,674,088
88	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan	IV.a	9	5,764,552	4,183,223	-	-	-	-	-	4,183,223
89	Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	796,804	-	-	4,183,223
90	Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan	III.b	11	7,618,323	4,738,687	-	-	1,579,562	-	-	6,318,250
91	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan	III.b	11	7,618,323	4,738,687	-	-	1,579,562	-	-	6,318,250
92	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan	III.b	11	7,618,323	4,738,687	-	-	1,579,562	-	-	6,318,250
93	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan	III.b	11	7,618,323	4,738,687	-	-	1,579,562	-	-	6,318,250
94	Kepala	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	II.b	14	13,730,842	6,453,496	-	-	6,072,932	-	-	12,526,428

MP

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT DAERAH	ESELON	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	Sekretaris	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	III.a	12	9,853,934	3,941,574	-	-	2,732,515	-	-	6,674,088
96	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	IV.a	8	4,633,197	3,522,327	-	-	640,423	-	-	4,162,750
97	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	796,804	-	-	4,183,223
98	Kepala Bidang Pengadaan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	III.b	11	7,618,323	4,738,687	-	-	1,579,562	-	-	6,318,250
99	Kepala Bidang Mutasi, Pensiun dan Kesejahteraan, Pengolahan Data dan Informasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	III.b	11	7,618,323	4,738,687	-	-	1,579,562	-	-	6,318,250
100	Kepala	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	II.b	14	13,730,842	6,453,496	-	-	5,883,138	-	-	12,336,633
101	Sekretaris	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	III.a	12	9,853,934	3,941,574	-	-	2,732,515	-	-	6,674,088
102	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IV.a	8	4,633,197	4,162,750	-	-	-	-	-	4,162,750
103	Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IV.a	8	4,633,197	3,386,419	-	-	796,804	-	-	4,183,223
104	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	III.b	11	7,618,323	4,738,687	-	-	1,316,302	-	-	6,054,989
105	Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	III.b	11	7,618,323	4,738,687	-	-	1,316,302	-	-	6,054,989
106	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	III.b	11	7,618,323	4,738,687	-	-	1,316,302	-	-	6,054,989
107	Kepala Bidang Pengaduan, Advokasi dan Pelaporan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	III.b	11	7,618,323	4,738,687	-	-	1,316,302	-	-	6,054,989
108	Kepala	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II.b	14	13,730,842	6,453,496	-	-	5,883,138	-	-	12,336,633
109	Sekretaris	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	III.a	12	9,853,934	3,941,574	-	-	2,732,515	-	-	6,674,088
110	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IV.a	8	4,633,197	4,162,750	-	-	-	-	-	4,162,750
111	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	796,804	-	-	4,183,223
112	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	III.b	11	7,618,323	4,738,687	-	-	1,316,302	-	-	6,054,989

N
R

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT DAERAH	ESELON	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BERAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	III.b	11	7,618,323	4,738,687	-	-	1,316,302	-	-	6,054,989
114	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	III.b	11	7,618,323	4,738,687	-	-	1,316,302	-	-	6,054,989
115	Kepala	Dinas Kesehatan	II.b	14	13,730,842	6,453,496	-	-	5,883,138	-	-	12,336,633
116	Sekretaris	Dinas Kesehatan	III.a	12	9,853,934	3,941,574	-	-	2,732,515	-	-	6,674,088
117	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Kesehatan	IV.a	8	4,633,197	4,162,750	-	-	-	-	-	4,162,750
118	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Kesehatan	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	796,804	-	-	4,183,223
119	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
120	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
121	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Dinas Kesehatan	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
122	Kepala	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	II.b	14	13,730,842	6,453,496	-	-	5,883,138	-	-	12,336,633
123	Sekretaris	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	III.a	12	9,853,934	3,941,574	-	-	2,732,515	-	-	6,674,088
124	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	IV.a	8	4,633,197	4,162,750	-	-	-	-	-	4,162,750
125	Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	796,804	-	-	4,183,223
126	Kepala Bidang Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
127	Kepala Bidang Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
128	Kepala Bidang Kepemudaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
129	Kepala Bidang Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
130	Kepala	Badan Keuangan dan Aset Daerah	II.b	14	13,730,842	6,453,496	-	-	6,072,932	-	-	12,526,428

MA

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT DAERAH	ESELON	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	Sekretaris	Badan Keuangan dan Aset Daerah	III.a	12	9,853,934	3,941,574	-	-	2,732,515	-	-	6,674,088
132	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Badan Keuangan dan Aset Daerah	IV.a	8	4,633,197	3,522,327	-	-	640,423	-	-	4,162,750
133	Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	796,804	-	-	4,183,223
134	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	III.b	11	7,618,323	4,738,687	-	-	1,579,562	-	-	6,318,250
135	Kepala Subbidang Belanja Operasi	Badan Keuangan dan Aset Daerah	IV.a	8	4,633,197	4,162,750	-	-	960,635	-	-	5,123,384
136	Kepala Subbidang Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga	Badan Keuangan dan Aset Daerah	IV.a	9	5,764,552	5,179,229	-	-	-	-	-	5,179,229
137	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	III.b	11	7,618,323	4,738,687	-	-	1,579,562	-	-	6,318,250
138	Kepala Subbidang Akuntansi Perangkat Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	IV.a	8	4,633,197	5,123,384	-	-	-	-	-	5,123,384
139	Kepala Subbidang Konsolidasi dan Pelaporan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	IV.a	8	4,633,197	5,123,384	-	-	-	-	-	5,123,384
140	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	III.b	11	7,618,323	4,738,687	-	-	1,579,562	-	-	6,318,250
141	Kepala Subbidang Analisa Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	IV.a	8	4,633,197	5,123,384	-	-	-	-	-	5,123,384
142	Kepala Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	IV.a	9	5,764,552	5,179,229	-	-	-	-	-	5,179,229
143	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	III.b	11	7,618,323	4,738,687	-	-	1,579,562	-	-	6,318,250
144	Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran	Badan Keuangan dan Aset Daerah	IV.a	8	4,633,197	5,123,384	-	-	-	-	-	5,123,384
145	Kepala Subbidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Anggaran	Badan Keuangan dan Aset Daerah	IV.a	8	4,633,197	5,123,384	-	-	-	-	-	5,123,384
146	Kepala	Dinas Pendidikan	II.b	14	13,730,842	6,453,496	-	-	5,883,138	-	-	12,336,633
147	Sekretaris	Dinas Pendidikan	III.a	12	9,853,934	3,941,574	-	-	2,732,515	-	-	6,674,088
148	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pendidikan	IV.a	9	5,764,552	4,541,785	-	-	-	-	-	4,541,785

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT DAERAH	ESELON	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan	Dinas Pendidikan	IV.a	9	5,764,552	3,784,821	-	-	756,964	-	-	4,541,785
150	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
151	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF	Dinas Pendidikan	IV.a	8	4,633,197	4,226,792	-	-	-	-	-	4,226,792
152	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF	Dinas Pendidikan	IV.a	8	4,633,197	4,226,792	-	-	-	-	-	4,226,792
153	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
154	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	IV.a	8	4,633,197	4,226,792	-	-	-	-	-	4,226,792
155	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	IV.a	8	4,633,197	4,226,792	-	-	-	-	-	4,226,792
156	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
157	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	IV.a	8	4,633,197	4,226,792	-	-	-	-	-	4,226,792
158	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	IV.a	8	4,633,197	4,226,792	-	-	-	-	-	4,226,792
159	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Dinas Pendidikan	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
160	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan	IV.a	8	4,633,197	4,226,792	-	-	-	-	-	4,226,792
161	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	IV.a	8	4,633,197	4,226,792	-	-	-	-	-	4,226,792
162	Kepala	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	II.b	14	13,730,842	6,453,496	-	-	5,883,138	-	-	12,336,633
163	Sekretaris	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	III.a	12	9,853,934	3,941,574	-	-	2,732,515	-	-	6,674,088
164	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	IV.a	8	4,633,197	4,162,750	-	-	-	-	-	4,162,750
165	Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	796,804	-	-	4,183,223
166	Kepala Bidang Teknologi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT DAERAH	ESELON	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROPESE	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
168	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
169	Kepala Bidang Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
170	Kepala	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	II.b	14	13,730,842	6,453,496	-	-	5,883,138	-	-	12,336,633
171	Sekretaris	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	III.a	12	9,853,934	3,941,574	-	-	2,732,515	-	-	6,674,088
172	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	IV.a	8	4,633,197	4,162,750	-	-	-	-	-	4,162,750
173	Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	796,804	-	-	4,183,223
174	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
175	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
176	Kepala Bidang Kemetrolgian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
177	Kepala	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II.b	14	13,730,842	6,453,496	-	-	5,883,138	-	-	12,336,633
178	Sekretaris	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	III.a	12	9,853,934	3,941,574	-	-	2,732,515	-	-	6,674,088
179	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV.a	8	4,633,197	4,162,750	-	-	-	-	-	4,162,750
180	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	796,804	-	-	4,183,223
181	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
182	Kepala Bidang Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
183	Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
184	Kepala Bidang Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468

MP

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT DAERAH	ESELON	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	Kepala	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	II.b	14	13,730,842	6,453,496	-	-	5,883,138	-	-	12,336,633
186	Sekretaris	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	III.a	12	9,853,934	3,941,574	-	-	2,732,515	-	-	6,674,088
187	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	IV.a	8	4,633,197	4,162,750	-	-	-	-	-	4,162,750
188	Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	796,804	-	-	4,183,223
189	Kepala Bidang Perumahan dan Penataan Kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
190	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
191	Kepala Bidang Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
192	Kepala	Dinas Sosial	II.b	14	13,730,842	6,453,496	-	-	5,883,138	-	-	12,336,633
193	Sekretaris	Dinas Sosial	III.a	12	9,853,934	3,941,574	-	-	2,732,515	-	-	6,674,088
194	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Sosial	IV.a	8	4,633,197	4,162,750	-	-	-	-	-	4,162,750
195	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Sosial	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	796,804	-	-	4,183,223
196	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
197	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
198	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
199	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
200	Kepala	Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja	II.b	14	13,730,842	6,453,496	-	-	5,883,138	-	-	12,336,633
201	Sekretaris	Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja	III.a	12	9,853,934	3,941,574	-	-	2,732,515	-	-	6,674,088
202	Kepala Subbagian Umum Kepegawaian	Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja	IV.a	8	4,633,197	4,162,750	-	-	-	-	-	4,162,750

MA

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT DAERAH	ESELON	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	796,804	-	-	4,183,223
204	Kepala Bidang Perencanaan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
205	Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
206	Kepala Bidang Perindustrian	Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
207	Kepala UPT Balai Latihan Kerja	Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja	IV.a	8	4,633,197	3,846,263	-	-	796,804	-	-	4,643,067
208	Kepala UPT Industri Rotan Hampangen	Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	796,804	-	-	4,183,223
209	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Industri Rotan Hampangen	Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja	IV.b	8	4,633,197	2,561,692	-	-	-	-	-	2,561,692
210	Kepala	Dinas Lingkungan Hidup	II.b	14	13,730,842	6,453,496	-	-	5,883,138	-	-	12,336,633
211	Sekretaris	Dinas Lingkungan Hidup	III.a	12	9,853,934	3,941,574	-	-	2,732,515	-	-	6,674,088
212	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup	IV.a	8	4,633,197	4,162,750	-	-	-	-	-	4,162,750
213	Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan	Dinas Lingkungan Hidup	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	796,804	-	-	4,183,223
214	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
215	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Dinas Lingkungan Hidup	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
216	Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
217	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
218	Kepala	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	II.b	14	13,730,842	6,453,496	-	-	5,883,138	-	-	12,336,633
219	Sekretaris	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	III.a	12	9,853,934	3,941,574	-	-	2,732,515	-	-	6,674,088
220	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	IV.a	8	4,633,197	3,522,327	-	-	640,423	-	-	4,162,750

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT DAERAH	ESELON	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	Kepala Subbagian Keuangan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	796,804	-	-	4,183,223
222	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	796,804	-	-	4,183,223
223	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
224	Kepala Subbidang Pengcakan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	864,571	-	-	4,250,990
225	Kepala Subbidang Kerjasama Antar Lembaga	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	864,571	-	-	4,250,990
226	Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
227	Kepala Subbidang Operasional dan Pengendalian Personil	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	864,571	-	-	4,250,990
228	Kepala Subbidang Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	IV.a	8	4,633,197	3,362,221	-	-	864,571	-	-	4,226,792
229	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
230	Kepala Subbidang Pembinaan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	IV.a	8	4,633,197	3,362,221	-	-	864,571	-	-	4,226,792
231	Kepala Subbidang Pelatihan dan Pengembangan Sat. Linmas	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	IV.a	8	4,633,197	3,362,221	-	-	864,571	-	-	4,226,792
232	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
233	Kepala Subbidang Operasional dan Personil	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	IV.a	8	4,633,197	3,362,221	-	-	864,571	-	-	4,226,792
234	Kepala Subbidang Sarana dan Prasarana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	IV.a	8	4,633,197	3,362,221	-	-	864,571	-	-	4,226,792
235	Kepala	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	II.b	14	13,730,842	6,453,496	-	-	5,883,138	-	-	12,336,633
236	Sekretaris	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	III.b	12	9,853,934	3,941,574	-	-	2,732,515	-	-	6,674,088
237	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	IV.a	8	4,633,197	4,162,750	-	-	-	-	-	4,162,750
238	Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	796,804	-	-	4,183,223

KR

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT DAERAH	ESELON	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
239	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
240	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
241	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
242	Direktur	Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan	III.a	12	9,853,934	3,941,574	-	-	3,549,750	-	-	7,491,323
243	Kepala Bidang Pelayanan Medik	Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
244	Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan Rawat Jalan	Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan	IV.a	8	4,633,197	3,522,327	-	-	640,423	-	-	4,162,750
245	Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan Rawat Inap	Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan	IV.a	8	4,633,197	3,522,327	-	-	640,423	-	-	4,162,750
246	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang	Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
247	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik	Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	796,804	-	-	4,183,223
248	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik	Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	796,804	-	-	4,183,223
249	Kepala Bidang Keuangan	Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
250	Kepala Seksi Verifikasi dan Perbendaharaan	Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan	IV.a	8	4,633,197	3,522,327	-	-	640,423	-	-	4,162,750
251	Kepala Seksi Akuntansi dan Aset	Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan	IV.a	8	4,633,197	3,522,327	-	-	640,423	-	-	4,162,750
252	Kepala Bagian Kesekretariatan	Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
253	Kepala Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	796,804	-	-	4,183,223
254	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Hukum	Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan	IV.a	8	4,633,197	3,522,327	-	-	640,423	-	-	4,162,750
255	Kepala Subbagian Program dan Anggaran	Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan	IV.a	8	4,633,197	3,522,327	-	-	640,423	-	-	4,162,750
256	Kepala	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	II.b	14	13,730,842	6,453,496	-	-	5,883,138	-	-	12,336,633

MP

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT DAERAH	ESELON	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BEKTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
257	Sekretaris	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	III.a	12	9,853,934	3,941,574	-	-	2,732,515	-	-	6,674,088
258	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	IV.a	8	4,633,197	4,162,750	-	-	-	-	-	4,162,750
259	Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	IV.a	9	5,764,552	3,386,419	-	-	796,804	-	-	4,183,223
260	Kepala Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
261	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
262	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
263	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
264	Kepala	Badan Pendapatan Daerah	II.b	14	13,730,842	6,453,496	-	-	6,072,932	-	-	12,526,428
265	Sekretaris	Badan Pendapatan Daerah	III.a	12	9,853,934	3,941,574	-	-	2,732,515	-	-	6,674,088
266	Kepala Subbagian Tata Usaha	Badan Pendapatan Daerah	IV.a	8	4,633,197	5,123,384	-	-	-	-	-	5,123,384
267	Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, Perhitungan, Penilaian, Penetapan dan Keberatan	Badan Pendapatan Daerah	III.b	11	7,618,323	4,738,687	-	-	1,579,562	-	-	6,318,250
268	Kepala Subbidang Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Restribusi	Badan Pendapatan Daerah	IV.a	8	4,633,197	5,123,384	-	-	-	-	-	5,123,384
269	Kepala Subbidang Perhitungan, Penilaian, Penetapan dan Keberatan	Badan Pendapatan Daerah	IV.a	8	4,633,197	5,123,384	-	-	-	-	-	5,123,384
270	Kepala Bidang Pelayanan, Sistem Informasi, Pembukuan dan Pelaporan	Badan Pendapatan Daerah	III.b	11	7,618,323	4,738,687	-	-	1,579,562	-	-	6,318,250
271	Kepala Subbidang Pelayanan dan Sistem Informasi	Badan Pendapatan Daerah	IV.a	8	4,633,197	5,123,384	-	-	-	-	-	5,123,384
272	Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan	Badan Pendapatan Daerah	IV.a	8	4,633,197	5,123,384	-	-	-	-	-	5,123,384
273	Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Piutang	Badan Pendapatan Daerah	III.b	11	7,618,323	4,738,687	-	-	1,579,562	-	-	6,318,250
274	Kepala Subbidang Penagihan	Badan Pendapatan Daerah	IV.a	8	4,633,197	5,123,384	-	-	-	-	-	5,123,384

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT DAERAH	ESELON	KELAS JABATAN	BASIC TFP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
275	Kepala Subbidang Pemeriksaan dan Penyelesaian Piutang	Badan Pendapatan Daerah	IV.a	8	4,633,197	5,123,384	-	-	-	-	-	5,123,384
276	Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	III.b	11	7,618,323	4,738,687	-	-	1,579,562	-	-	6,318,250
277	Kepala Subbidang Penelitian dan Regulasi, Kerjasama, Penyuluhan dan Sosialisasi	Badan Pendapatan Daerah	IV.a	8	4,633,197	5,123,384	-	-	-	-	-	5,123,384
278	Kepala Subbidang Perencanaan Pendapatan, Monitoring dan Evaluasi	Badan Pendapatan Daerah	IV.a	8	4,633,197	5,123,384	-	-	-	-	-	5,123,384
279	Kepala UPT Pelayanan Pendapatan Daerah di Hampalit	Badan Pendapatan Daerah	IV.a	9	5,764,552	4,183,223	-	-	-	-	-	4,183,223
280	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pelayanan Pendapatan Daerah di Hampalit	Badan Pendapatan Daerah	IV.b	8	4,633,197	2,561,692	-	-	-	-	-	2,561,692
281	Kepala UPT Pelayanan Pendapatan Daerah di Pagatan	Badan Pendapatan Daerah	IV.a	9	5,764,552	4,183,223	-	-	-	-	-	4,183,223
282	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pelayanan Pendapatan Daerah di Pagatan	Badan Pendapatan Daerah	IV.b	8	4,633,197	2,561,692	-	-	-	-	-	2,561,692
283	Kepala UPT Pelayanan Pendapatan Daerah di Tumbang Samba	Badan Pendapatan Daerah	IV.a	9	5,764,552	4,183,223	-	-	-	-	-	4,183,223
284	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pelayanan Pendapatan Daerah di Tumbang Samba	Badan Pendapatan Daerah	IV.b	8	4,633,197	2,561,692	-	-	-	-	-	2,561,692
285	Kepala	Dinas Perhubungan dan Perikanan	II.b	14	13,730,842	6,453,496	-	-	5,883,138	-	-	12,336,633
286	Sekretaris	Dinas Perhubungan dan Perikanan	III.a	12	9,853,934	3,941,574	-	-	2,732,515	-	-	6,674,088
287	Kepala UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Katingan Hilir	Dinas Perhubungan dan Perikanan	IV.a	9	5,764,552	4,183,223	-	-	-	-	-	4,183,223
288	Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Katingan Hilir	Dinas Perhubungan dan Perikanan	IV.b	8	4,633,197	2,561,692	-	-	-	-	-	2,561,692
289	Kepala UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Katingan Tengah	Dinas Perhubungan dan Perikanan	IV.a	9	5,764,552	4,183,223	-	-	-	-	-	4,183,223
290	Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Katingan Tengah	Dinas Perhubungan dan Perikanan	IV.b	8	4,633,197	2,561,692	-	-	-	-	-	2,561,692
291	Kepala UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Katingan Kuala	Dinas Perhubungan dan Perikanan	IV.a	9	5,764,552	4,183,223	-	-	-	-	-	4,183,223
292	Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Katingan Kuala	Dinas Perhubungan dan Perikanan	IV.b	8	4,633,197	2,561,692	-	-	-	-	-	2,561,692

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT DAERAH	ESELON	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
293	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Perhubungan dan Perikanan	IV.a	8	4,633,197	4,162,750	-	-	-	-	-	4,162,750
294	Kepala Subbagian Keuangan	Dinas Perhubungan dan Perikanan	IV.a	8	4,633,197	4,162,750	-	-	-	-	-	4,162,750
295	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Perhubungan dan Perikanan	IV.a	8	4,633,197	4,162,750	-	-	-	-	-	4,162,750
296	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Dinas Perhubungan dan Perikanan	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
297	Kepala Seksi Lalu Lintas	Dinas Perhubungan dan Perikanan	IV.a	8	4,633,197	4,226,792	-	-	-	-	-	4,226,792
298	Kepala Seksi Lalu Angkutan	Dinas Perhubungan dan Perikanan	IV.a	8	4,633,197	4,226,792	-	-	-	-	-	4,226,792
299	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Dinas Perhubungan dan Perikanan	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
300	Kepala Seksi Prasarana	Dinas Perhubungan dan Perikanan	IV.a	8	4,633,197	4,226,792	-	-	-	-	-	4,226,792
301	Kepala Seksi Lalu Keselamatan	Dinas Perhubungan dan Perikanan	IV.a	8	4,633,197	4,226,792	-	-	-	-	-	4,226,792
302	Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing	Dinas Perhubungan dan Perikanan	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
303	Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan	Dinas Perhubungan dan Perikanan	III.b	11	7,618,323	4,475,427	-	-	1,053,042	-	-	5,528,468
304	Camat Bukit Raya	Kecamatan Bukit Raya	III.a	12	9,853,934	6,810,294	-	-	-	-	-	6,810,294
305	Sekretaris	Kecamatan Bukit Raya	III.b	11	7,618,323	5,528,468	-	-	-	-	-	5,528,468
306	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Bukit Raya	IV.b	8	4,633,197	2,988,017	-	-	-	-	-	2,988,017
307	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kecamatan Bukit Raya	IV.b	9	5,764,552	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
308	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Bukit Raya	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
309	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bukit Raya	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
310	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Bukit Raya	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT DAERAH	ESELON	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
311	Kepala Seksi Pembangunan	Kecamatan Bukit Raya	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
312	Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Kecamatan Bukit Raya	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
313	Camat Kamipang	Kecamatan Kamipang	III.a	12	9,853,934	6,810,294	-	-	-	-	-	6,810,294
314	Sekretaris	Kecamatan Kamipang	III.b	11	7,618,323	5,528,468	-	-	-	-	-	5,528,468
315	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Kamipang	IV.b	8	4,633,197	2,988,017	-	-	-	-	-	2,988,017
316	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kecamatan Kamipang	IV.b	9	5,764,552	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
317	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Kamipang	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
318	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kamipang	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
319	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Kamipang	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
320	Kepala Seksi Pembangunan	Kecamatan Kamipang	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
321	Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Kecamatan Kamipang	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
322	Camat Katingan Hilir	Kecamatan Katingan Hilir	III.a	12	9,853,934	6,810,294	-	-	-	-	-	6,810,294
323	Sekretaris	Kecamatan Katingan Hilir	III.b	11	7,618,323	5,528,468	-	-	-	-	-	5,528,468
324	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Katingan Hilir	IV.b	8	4,633,197	2,988,017	-	-	-	-	-	2,988,017
325	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kecamatan Katingan Hilir	IV.b	9	5,764,552	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
326	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Katingan Hilir	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
327	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Katingan Hilir	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
328	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Katingan Hilir	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT DAERAH	ESELON	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
329	Kepala Seksi Pembangunan	Kecamatan Katingan Hilir	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
330	Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Kecamatan Katingan Hilir	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
331	Camat Katingan Hulu	Kecamatan Katingan Hulu	III.a	12	9,853,934	6,810,294	-	-	-	-	-	6,810,294
332	Sekretaris	Kecamatan Katingan Hulu	III.b	11	7,618,323	5,528,468	-	-	-	-	-	5,528,468
333	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Katingan Hulu	IV.b	8	4,633,197	2,988,017	-	-	-	-	-	2,988,017
334	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kecamatan Katingan Hulu	IV.b	9	5,764,552	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
335	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Katingan Hulu	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
336	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Katingan Hulu	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
337	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Katingan Hulu	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
338	Kepala Seksi Pembangunan	Kecamatan Katingan Hulu	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
339	Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Kecamatan Katingan Hulu	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
340	Camat Katingan Kuala	Kecamatan Katingan Kuala	III.a	12	9,853,934	6,810,294	-	-	-	-	-	6,810,294
341	Sekretaris	Kecamatan Katingan Kuala	III.b	11	7,618,323	5,528,468	-	-	-	-	-	5,528,468
342	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Katingan Kuala	IV.b	8	4,633,197	2,988,017	-	-	-	-	-	2,988,017
343	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kecamatan Katingan Kuala	IV.b	9	5,764,552	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
344	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Katingan Kuala	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
345	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Katingan Kuala	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
346	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Katingan Kuala	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT DAERAH	ESKELON	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
347	Kepala Seksi Pembangunan	Kecamatan Katingan Kuala	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
348	Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Kecamatan Katingan Kuala	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
349	Camat Katingan Tengah	Kecamatan Katingan Tengah	III.a	12	9,853,934	6,810,294	-	-	-	-	-	6,810,294
350	Sekretaris	Kecamatan Katingan Tengah	III.b	11	7,618,323	5,528,468	-	-	-	-	-	5,528,468
351	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Katingan Tengah	IV.b	8	4,633,197	2,988,017	-	-	-	-	-	2,988,017
352	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kecamatan Katingan Tengah	IV.b	9	5,764,552	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
353	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Katingan Tengah	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
354	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Katingan Tengah	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
355	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Katingan Tengah	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
356	Kepala Seksi Pembangunan	Kecamatan Katingan Tengah	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
357	Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Kecamatan Katingan Tengah	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
358	Camat Marikit	Kecamatan Marikit	III.a	12	9,853,934	6,810,294	-	-	-	-	-	6,810,294
359	Sekretaris	Kecamatan Marikit	III.b	11	7,618,323	5,528,468	-	-	-	-	-	5,528,468
360	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Marikit	IV.b	8	4,633,197	2,988,017	-	-	-	-	-	2,988,017
361	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kecamatan Marikit	IV.b	9	5,764,552	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
362	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Marikit	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
363	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Marikit	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
364	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Marikit	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348

MA

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT DAERAH	ESELON	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
365	Kepala Seksi Pembangunan	Kecamatan Marikit	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
366	Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Kecamatan Marikit	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
367	Camat Mendawai	Kecamatan Mendawai	III.a	12	9,853,934	6,810,294	-	-	-	-	-	6,810,294
368	Sekretaris	Kecamatan Mendawai	III.b	11	7,618,323	5,528,468	-	-	-	-	-	5,528,468
369	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Mendawai	IV.b	8	4,633,197	2,988,017	-	-	-	-	-	2,988,017
370	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kecamatan Mendawai	IV.b	9	5,764,552	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
371	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Mendawai	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
372	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Mendawai	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
373	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Mendawai	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
374	Kepala Seksi Pembangunan	Kecamatan Mendawai	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
375	Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Kecamatan Mendawai	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
376	Camat Petak Malai	Kecamatan Petak Malai	III.a	12	9,853,934	6,810,294	-	-	-	-	-	6,810,294
377	Sekretaris	Kecamatan Petak Malai	III.b	11	7,618,323	5,528,468	-	-	-	-	-	5,528,468
378	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Petak Malai	IV.b	8	4,633,197	2,988,017	-	-	-	-	-	2,988,017
379	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kecamatan Petak Malai	IV.b	9	5,764,552	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
380	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Petak Malai	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
381	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Petak Malai	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
382	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Petak Malai	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT DAERAH	ESELON	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
383	Kepala Seksi Pembangunan	Kecamatan Petak Malai	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
384	Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Kecamatan Petak Malai	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
385	Camat Pulau Malan	Kecamatan Pulau Malan	III.a	12	9,853,934	6,810,294	-	-	-	-	-	6,810,294
386	Sekretaris	Kecamatan Pulau Malan	III.b	11	7,618,323	5,528,468	-	-	-	-	-	5,528,468
387	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pulau Malan	IV.b	8	4,633,197	2,988,017	-	-	-	-	-	2,988,017
388	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kecamatan Pulau Malan	IV.b	9	5,764,552	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
389	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Pulau Malan	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
390	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pulau Malan	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
391	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Pulau Malan	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
392	Kepala Seksi Pembangunan	Kecamatan Pulau Malan	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
393	Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Kecamatan Pulau Malan	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
394	Camat Sanaman Mantikei	Kecamatan Sanaman Mantikei	III.a	12	9,853,934	6,810,294	-	-	-	-	-	6,810,294
395	Sekretaris	Kecamatan Sanaman Mantikei	III.b	11	7,618,323	5,528,468	-	-	-	-	-	5,528,468
396	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sanaman Mantikei	IV.b	8	4,633,197	2,988,017	-	-	-	-	-	2,988,017
397	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kecamatan Sanaman Mantikei	IV.b	9	5,764,552	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
398	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Sanaman Mantikei	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
399	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Sanaman Mantikei	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
400	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Sanaman Mantikei	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT DAERAH	ESELON	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
401	Kepala Seksi Pembangunan	Kecamatan Sanaman Mantikci	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
402	Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Kecamatan Sanaman Mantikci	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
403	Camat Tasik Payawan	Kecamatan Tasik Payawan	III.a	12	9,853,934	6,810,294	-	-	-	-	-	6,810,294
404	Sekretaris	Kecamatan Tasik Payawan	III.b	11	7,618,323	5,528,468	-	-	-	-	-	5,528,468
405	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Tasik Payawan	IV.b	8	4,633,197	2,988,017	-	-	-	-	-	2,988,017
406	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kecamatan Tasik Payawan	IV.b	9	5,764,552	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
407	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Tasik Payawan	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
408	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tasik Payawan	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
409	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Tasik Payawan	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
410	Kepala Seksi Pembangunan	Kecamatan Tasik Payawan	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
411	Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Kecamatan Tasik Payawan	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
412	Camat Tewang Sangalang Garing	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	III.a	12	9,853,934	6,810,294	-	-	-	-	-	6,810,294
413	Sekretaris	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	III.b	11	7,618,323	5,528,468	-	-	-	-	-	5,528,468
414	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	IV.b	8	4,633,197	2,988,017	-	-	-	-	-	2,988,017
415	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	IV.b	9	5,764,552	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
416	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
417	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
418	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348

MP

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT DAERAH	ESELON	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DIJERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
419	Kepala Seksi Pembangunan	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
420	Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	IV.a	8	4,633,197	3,554,348	-	-	-	-	-	3,554,348
421	Lurah Pegatan Hilir	Kelurahan Pegatan Hilir	IV.a	9	5,764,552	4,103,543	-	-	-	-	-	4,103,543
422	Sekretaris	Kelurahan Pegatan Hilir	IV.b	8	4,633,197	3,106,052	-	-	-	-	-	3,106,052
423	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kelurahan Pegatan Hilir	IV.b	8	4,633,197	2,625,734	-	-	-	-	-	2,625,734
424	Kepala Seksi Pemberdaya Masyarakat	Kelurahan Pegatan Hilir	IV.b	8	4,633,197	2,625,734	-	-	-	-	-	2,625,734
425	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Pegatan Hilir	IV.b	8	4,633,197	2,625,734	-	-	-	-	-	2,625,734
426	Lurah Pegatan Hulu	Kelurahan Pegatan Hulu	IV.a	9	5,764,552	4,103,543	-	-	-	-	-	4,103,543
427	Sekretaris	Kelurahan Pegatan Hulu	IV.b	8	4,633,197	3,106,052	-	-	-	-	-	3,106,052
428	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kelurahan Pegatan Hulu	IV.b	8	4,633,197	2,625,734	-	-	-	-	-	2,625,734
429	Kepala Seksi Pemberdaya Masyarakat	Kelurahan Pegatan Hulu	IV.b	8	4,633,197	2,625,734	-	-	-	-	-	2,625,734
430	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Pegatan Hulu	IV.b	8	4,633,197	2,625,734	-	-	-	-	-	2,625,734
431	Lurah Kasongan Baru	Kelurahan Kasongan Baru	IV.a	9	5,764,552	4,103,543	-	-	-	-	-	4,103,543
432	Sekretaris	Kelurahan Kasongan Baru	IV.b	8	4,633,197	3,106,052	-	-	-	-	-	3,106,052
433	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kelurahan Kasongan Baru	IV.b	8	4,633,197	2,625,734	-	-	-	-	-	2,625,734
434	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Kasongan Baru	IV.b	8	4,633,197	2,625,734	-	-	-	-	-	2,625,734
435	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Kasongan Baru	IV.b	8	4,633,197	2,625,734	-	-	-	-	-	2,625,734
436	Lurah Kasongan Lama	Kelurahan Kasongan Lama	IV.a	9	5,764,552	4,103,543	-	-	-	-	-	4,103,543

MP

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT DAERAH	ESELON	KELAS JABATAN	BASIC TPP	HEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
437	Sekretaris	Kelurahan Kasongan Lama	IV.b	8	4,633,197	3,106,052	-	-	-	-	-	3,106,052
438	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kelurahan Kasongan Lama	IV.b	8	4,633,197	2,625,734	-	-	-	-	-	2,625,734
439	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Kasongan Lama	IV.b	8	4,633,197	2,625,734	-	-	-	-	-	2,625,734
440	Kepala Seksi Ketenteraman dan Kertertiban Umum	Kelurahan Kasongan Lama	IV.b	8	4,633,197	2,625,734	-	-	-	-	-	2,625,734
441	Lurah Pendahara	Kelurahan Pendahara	IV.a	9	5,764,552	4,103,543	-	-	-	-	-	4,103,543
442	Sekretaris	Kelurahan Pendahara	IV.b	8	4,633,197	3,106,052	-	-	-	-	-	3,106,052
443	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kelurahan Pendahara	IV.b	8	4,633,197	2,625,734	-	-	-	-	-	2,625,734
444	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Pendahara	IV.b	8	4,633,197	2,625,734	-	-	-	-	-	2,625,734
445	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Pendahara	IV.b	8	4,633,197	2,625,734	-	-	-	-	-	2,625,734
446	Lurah Samba Kahayan	Kelurahan Samba Kahayan	IV.a	9	5,764,552	4,103,543	-	-	-	-	-	4,103,543
447	Sekretaris	Kelurahan Samba Kahayan	IV.b	8	4,633,197	3,106,052	-	-	-	-	-	3,106,052
448	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kelurahan Samba Kahayan	IV.b	8	4,633,197	2,625,734	-	-	-	-	-	2,625,734
449	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Samba Kahayan	IV.b	8	4,633,197	2,625,734	-	-	-	-	-	2,625,734
450	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Samba Kahayan	IV.b	8	4,633,197	2,625,734	-	-	-	-	-	2,625,734
451	Lurah Tumbang Sanamang	Kelurahan Tumbang Sanamang	IV.a	9	5,764,552	4,103,543	-	-	-	-	-	4,103,543
452	Sekretaris	Kelurahan Tumbang Sanamang	IV.b	8	4,633,197	3,106,052	-	-	-	-	-	3,106,052
453	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kelurahan Tumbang Sanamang	IV.b	8	4,633,197	2,625,734	-	-	-	-	-	2,625,734
454	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Tumbang Sanamang	IV.b	8	4,633,197	2,625,734	-	-	-	-	-	2,625,734

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT DAERAH	ESELON	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
455	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Tumbang Sanamang	IV.b	8	4,633,197	2,625,734	-	-	-	-	-	2,625,734
456	Direktur	Rumah Sakit Umum Daerah Pratama	III.b	11	7,618,323	5,265,208	-	-	1,579,562	-	-	6,844,770
457	Kepala Subbagian Tata Usaha	Rumah Sakit Umum Daerah Pratama	IV.a	8	4,633,197	3,522,327	-	640,423	-	-	-	4,162,750
458	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang	Rumah Sakit Umum Daerah Pratama	IV.a	8	4,633,197	3,522,327	-	640,423	-	-	-	4,162,750
459	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Pratama	IV.a	8	4,633,197	3,522,327	-	640,423	-	-	-	4,162,750



MP

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 10 TAHUN 2024
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI JABATAN PELAKSANA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

NO	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sekretariat Daerah	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	2,061,003	-	-	-	-	-	2,061,003
	Bagian Unit Layanan Pengadaan/Jasa pada Sekretariat Daerah	6	3,549,880	2,477,918	-	-	-	-	-	2,477,918
		7	4,085,072	2,851,497	-	-	-	-	-	2,851,497
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
3	Inspektorat	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127

NO	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	2,061,003	-	-	-	-	-	2,061,003
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	2,061,003	-	-	-	-	-	2,061,003
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	2,061,003	-	-	-	-	-	2,061,003
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	2,061,003	-	-	-	-	-	2,061,003
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127

NO	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
11	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127

NO	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
12	Dinas Kesehatan	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
15	Dinas Lingkungan Hidup	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127

NO	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
16	Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
19	Dinas Pendidikan	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127

NO	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
20	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
21	Dinas Sosial	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
22	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964

NO	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
24	Dinas Perhubungan dan Perikanan	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
25	Badan Pendapatan Daerah	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
26	Satuan Polisi Pamong Praja	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
27	Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan dan Rumah Sakit Umum Daerah Pratama	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
28	Kecamatan Bukit Raya	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558

NO	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Kecamatan Petak Malai	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
30	Kecamatan Katingan Hulu	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
31	Kecamatan Marikit	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
32	Kecamatan Katingan Kuala	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558

NO	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Kecamatan Mendawai	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
34	Kecamatan Tasik Payawan	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
35	Kecamatan Kamipang	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
36	Kecamatan Sanaman Mantikei	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558

NO	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Kecamatan Katingan Tengah	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
38	Kecamatan Pulau Malan	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
39	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
40	Kecamatan Katingan Hilir	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558

NO	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Kelurahan Kasongan Lama	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
42	Kelurahan Kasongan Baru	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
43	Kelurahan Pendahara	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
44	Kelurahan Samba Kahayan	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027

NO	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
45	Kelurahan Tumbang Sanamang	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
46	Kelurahan Pegatan Hulu	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558
47	Kelurahan Pegatan Hilir	1	948,441	970,127	-	-	-	-	-	970,127
		3	1,449,760	1,001,964	-	-	-	-	-	1,001,964
		5	2,960,491	1,084,416	-	-	-	-	-	1,084,416
		6	3,549,880	1,315,027	-	-	-	-	-	1,315,027
		7	4,085,072	1,764,558	-	-	-	-	-	1,764,558



M.F.

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 10 TAHUN 2024
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Guru Pertama	8	4.633.197	864.571	-	-	-	-	-	864.571
2	Guru Pertama (Terpencil)	8	4.633.197	864.571	-	300.000	-	-	-	1.164.571
3	Guru Pertama (Sangat Terpencil)	8	4.633.197	864.571	-	500.000	-	-	-	1.364.571
4	Guru Muda	9	5.764.552	876.485	-	-	-	-	-	876.485
5	Guru Muda (Terpencil)	9	5.764.552	876.485	-	300.000	-	-	-	1.176.485
6	Guru Muda (Sangat Terpencil)	9	5.764.552	876.485	-	500.000	-	-	-	1.376.485
7	Guru Madya	11	7.618.323	947.737	-	-	-	-	-	947.737
8	Guru Madya (Terpencil)	11	7.618.323	921.411	-	300.000	-	-	-	1.221.411
9	Guru Madya (Sangat Terpencil)	11	7.618.323	921.411	-	500.000	-	-	-	1.421.411
10	Pengawas sekolah Muda	9	5.764.552	956.165	-	-	-	-	-	956.165

MP

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Pengawas sekolah Madya	11	7.618.323	1.421.606	-	-	-	-	-	1.421.606
12	Penilik Muda	9	5.764.552	956.165	-	-	-	-	-	956.165
13	Penilik Madya	11	7.618.323	1.421.606	-	-	-	-	-	1.421.606
14	Pamong Belajar Muda	9	5.764.552	956.165	-	-	-	-	-	956.165
15	Pamong Belajar Madya	11	7.618.323	1.421.606	-	-	-	-	-	1.421.606
16	Auditor Pelaksana Lanjutan	7	4.085.072	1.976.304	-	-	1.411.646	-	-	3.387.950
17	Auditor Pertama	8	4.633.197	2.305.523	-	-	1.601.058	-	-	3.906.580
18	Auditor Muda	10	6.626.771	2.518.957	-	-	2.289.961	-	-	4.808.918
19	Auditor Madya	12	9.853.934	2.928.426	-	-	3.405.147	-	-	6.333.573
20	Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Pertama	8	4.633.197	2.305.523	-	-	1.601.058	-	-	3.906.580
21	Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Muda	10	6.626.771	2.518.957	-	-	2.289.961	-	-	4.808.918
22	Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Madya	12	9.853.934	2.928.426	-	-	3.405.147	-	-	6.333.573
23	Dokter Pertama	9	5.764.552	3.984.022	-	-	1.792.810	-	-	5.776.832
24	Dokter Pertama (Terpencil)	9	5.764.552	3.984.022	-	1.593.609	1.792.810	-	-	7.370.441

KP

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Dokter Pertama (Sangat Terpencil)	9	5.764.552	3.984.022	-	2.191.212	1.792.810	-	-	7.968.044
26	Dokter Pertama (Spesialis)	9	5.764.552	3.984.022	-	-	4.382.424	30.000.000	-	38.366.446
27	Dokter Muda	10	6.626.771	3.984.532	-	-	1.969.366	-	-	5.953.899
28	Dokter Muda (Terpencil)	10	6.626.771	3.984.532	-	1.511.374	1.969.366	-	-	7.465.273
29	Dokter Muda (Sangat Terpencil)	10	6.626.771	3.984.532	-	2.060.965	1.969.366	-	-	8.014.864
30	Dokter Muda (Spesialis)	10	6.626.771	3.984.532	-	-	4.442.524	30.000.000	-	38.427.056
31	Dokter Madya	12	9.853.934	3.984.022	-	-	3.268.941	-	-	7.252.963
32	Dokter Madya (Terpencil)	12	9.853.934	3.984.022	-	1.089.647	3.268.941	-	-	8.342.610
33	Dokter Madya (Sangat Terpencil)	12	9.853.934	3.984.022	-	1.702.574	3.268.941	-	-	8.955.537
34	Dokter Madya (Spesialis)	12	9.853.934	4.086.176	-	-	4.767.206	30.000.000	-	38.853.382
35	Perawat Madya, Perawat Gigi Madya	11	7.618.323	990.382	-	-	199.201	-	-	1.189.583
36	Perawat Madya, Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut Madya (terpencil)	11	7.618.323	990.382	-	517.923	199.201	-	-	1.707.506
37	Perawat Madya, Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut Madya (sangat terpencil)	11	7.618.323	990.382	-	756.964	199.201	-	-	1.946.547
38	Perawat Muda, Perawat Gigi Muda	9	5.764.552	896.405	-	-	199.201	-	-	1.095.606

KP

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Perawat Muda, Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut Muda (terpencil)	9	5.764.552	896.405	-	517.923	199.201	-	-	1.613.529
40	Perawat Muda, Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut Muda (sangat terpencil)	9	5.764.552	896.405	-	756.964	199.201	-	-	1.852.570
41	Perawat Penyelia, Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut Penyelia, Perawat Pertama, Perawat Gigi Pertama	8	4.633.197	864.571	-	-	160.106	-	-	1.024.677
42	Perawat Penyelia, Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut Penyelia, Perawat Pertama, Perawat Gigi Pertama (terpencil)	8	4.633.197	864.571	-	384.254	160.106	-	-	1.408.931
43	Perawat Penyelia, Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut Penyelia, Perawat Pertama, Perawat Gigi Pertama (Sangat Terpencil)	8	4.633.197	864.571	-	576.381	160.106	-	-	1.601.058
44	Perawat Mahir, Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	4.085.072	846.988	-	-	141.165	-	-	988.152
45	Perawat Mahir, Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut Mahir (terpencil)	7	4.085.072	846.988	-	395.261	141.165	-	-	1.383.413
46	Perawat Mahir, Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut Mahir (Sangat Terpencil)	7	4.085.072	846.988	-	592.891	141.165	-	-	1.581.044
47	Perawat Terampil, Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6	3.549.880	736.022	-	-	122.670	-	-	858.693
48	Perawat Terampil, Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut Terampil (terpencil)	6	3.549.880	736.022	-	392.545	122.670	-	-	1.251.238
49	Perawat Terampil, Perawat Gigi Terampil/Terapis Gigi dan Mulut (Sangat Terpencil)	6	3.549.880	736.022	-	490.682	122.670	-	-	1.349.374
50	Bidan Penyelia, Bidan Pertama	8	4.633.197	864.571	-	-	160.106	-	-	1.024.677
51	Bidan Penyelia, Bidan Pertama (Terpencil)	8	4.633.197	864.571	-	384.254	160.106	-	-	1.408.931
52	Bidan Penyelia, Bidan Pertama (sangat Terpencil)	8	4.633.197	864.571	-	576.381	160.106	-	-	1.601.058

NP

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Bidan Madya	11	7.618.323	990.382	-	-	199.201	-	-	1.189.583
54	Bidan Madya (Terpencil)	11	7.618.323	990.382	-	517.923	199.201	-	-	1.707.506
55	Bidan Madya (sangat Terpencil)	11	7.618.323	990.382	-	756.964	199.201	-	-	1.946.547
56	Bidan Muda	9	5.764.552	896.405	-	-	199.201	-	-	1.095.606
57	Bidan Muda (Terpencil)	9	5.764.552	896.405	-	517.923	199.201	-	-	1.613.529
58	Bidan Muda (sangat Terpencil)	9	5.764.552	896.405	-	756.964	199.201	-	-	1.852.570
59	Bidan Mahir	7	4.085.072	846.988	-	-	141.165	-	-	988.152
60	Bidan Mahir (Terpencil)	7	4.085.072	846.988	-	395.261	141.165	-	-	1.383.413
61	Bidan Mahir (sangat Terpencil)	7	4.085.072	846.988	-	592.891	141.165	-	-	1.581.044
62	Bidan Terampil	6	3.549.880	736.022	-	-	122.670	-	-	858.693
63	Bidan Terampil (Terpencil)	6	3.549.880	736.022	-	392.545	122.670	-	-	1.251.238
64	Bidan Terampil (sangat Terpencil)	6	3.549.880	736.022	-	490.682	122.670	-	-	1.349.374
65	Bidan Pemula	5	2.960.491	716.124	-	-	102.303	-	-	818.427
66	Bidan Pemula (Terpencil)	5	2.960.491	716.124	-	409.214	102.303	-	-	1.227.641

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Bidan Pemula (Sangat Terpenting)	5	2.960.491	716.124	-	511.517	102.303	-	-	1.329.944
68	Administrator Kesehatan Pertama	8	4.633.197	1.761.163	-	-	-	-	-	1.761.163
69	Administrator Kesehatan Muda	9	5.764.552	1.992.011	-	-	-	-	-	1.992.011
70	Apoteker Pertama	8	4.633.197	2.561.692	-	-	160.106	-	-	2.721.798
71	Apoteker Pertama (terpenting)	8	4.633.197	2.561.692	-	992.656	160.106	-	-	3.714.453
72	Apoteker Pertama (sangat terpenting)	8	4.633.197	2.561.692	-	2.481.639	160.106	-	-	5.203.437
73	Apoteker Muda	9	5.764.552	3.466.099	-	-	199.201	-	-	3.665.300
74	Apoteker Muda (Terpenting)	9	5.764.552	3.466.099	-	996.006	199.201	-	-	4.661.306
75	Apoteker Muda (sangat terpenting)	9	5.764.552	3.466.099	-	2.490.014	199.201	-	-	6.155.314
76	Apoteker Madya	11	7.618.323	3.422.385	-	-	263.260	-	-	3.685.646
77	Apoteker Madya (Terpenting)	11	7.618.323	3.422.385	-	1.000.390	263.260	-	-	4.686.035
78	Apoteker Madya (sangat terpenting)	11	7.618.323	3.422.385	-	2.474.648	263.260	-	-	6.160.293
79	Asisten Apoteker Pemula	5	2.960.491	716.124	-	-	102.303	-	-	818.427
80	Asisten Apoteker Pemula (Terpenting)	5	2.960.491	716.124	-	409.214	102.303	-	-	1.227.641

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Asisten Apoteker Pemula (sangat terampil)	5	2.960.491	716.124	-	511.517	102.303	-	-	1.329.944
82	Asisten Apoteker Terampil	6	3.549.880	736.022	-	-	122.670	-	-	858.693
83	Asisten Apoteker Terampil (terampil)	6	3.549.880	736.022	-	392.545	122.670	-	-	1.251.238
84	Asisten Apoteker Terampil (sangat terampil)	6	3.549.880	736.022	-	490.682	122.670	-	-	1.349.374
85	Asisten Apoteker Mahir	7	4.085.072	846.988	-	-	141.165	-	-	988.152
86	Asisten Apoteker Mahir (terampil)	7	4.085.072	846.988	-	395.261	141.165	-	-	1.383.413
87	Asisten Apoteker Mahir (sangat terampil)	7	4.085.072	846.988	-	592.891	141.165	-	-	1.581.044
88	Fisioterapis Terampil	6	3.549.880	736.022	-	-	122.670	-	-	858.693
89	Fisioterapis Terampil (terampil)	6	3.549.880	736.022	-	392.545	122.670	-	-	1.251.238
90	Fisioterapis Terampil (sangat terampil)	6	3.549.880	736.022	-	490.682	122.670	-	-	1.349.374
91	Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	4.633.197	1.152.761	-	-	160.106	-	-	1.312.867
92	Epidemiolog Kesehatan Pertama (terampil)	8	4.633.197	1.152.761	-	224.148	160.106	-	-	1.537.015
93	Epidemiolog Kesehatan Pertama (Sangat Terampil)	8	4.633.197	1.152.761	-	448.296	160.106	-	-	1.761.163
94	Nutrisionis Muda	9	5.764.552	1.274.887	-	-	-	-	-	1.274.887

SPZ

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Nutrisionis Muda (Terpencil)	9	5.764.552	1.274.887	-	358.562	-	-	-	1.633.449
96	Nutrisionis Muda (Sangat Terpencil)	9	5.764.552	1.274.887	-	597.603	-	-	-	1.872.490
97	Nutrisionis Penyelia, Nutrisionis Pertama	8	4.633.197	1.184.783	-	-	-	-	-	1.184.783
98	Nutrisionis Penyelia, Nutrisionis Pertama (terpencil)	8	4.633.197	1.184.783	-	352.233	-	-	-	1.537.015
99	Nutrisionis Penyelia, Nutrisionis Pertama (sangat terpencil)	8	4.633.197	1.184.783	-	544.360	-	-	-	1.729.142
100	Nutrisionis Mahir	7	4.085.072	988.152	-	-	-	-	-	988.152
101	Nutrisionis Mahir (terpencil)	7	4.085.072	988.152	-	367.028	-	-	-	1.355.180
102	Nutrisionis Mahir (sangat terpencil)	7	4.085.072	988.152	-	564.658	-	-	-	1.552.811
103	Nutrisionis Terampil	6	3.549.880	834.159	-	-	-	-	-	834.159
104	Nutrisionis Terampil (terpencil)	6	3.549.880	834.159	-	318.943	-	-	-	1.153.102
105	Nutrisionis Terampil (sangat terpencil)	6	3.549.880	834.159	-	637.886	-	-	-	1.472.045
106	Penata Anestesi Pertama	8	4.633.197	2.145.417	-	-	1.601.058	-	-	3.746.475

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Penata Anestesi Muda	9	5.764.552	2.191.212			1.832.650			4.023.862
108	Penata Anestesi Madya	11	7.618.323	2.369.344			2.000.779			4.370.123
109	Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	4.633.197	1.729.142	-	-	-	-	-	1.729.142
110	Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	5.764.552	1.992.011	-	-	-	-	-	1.992.011
111	Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	10	6.626.771	2.289.961	-	-	-	-	-	2.289.961
112	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia/Pertama	8	4.633.197	1.024.677	-	-	160.106	-	-	1.184.783
113	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia/Pertama (terpencil)	8	4.633.197	1.024.677	-	384.254	160.106	-	-	1.569.036
114	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia/Pertama (sangat terpencil)	8	4.633.197	1.024.677	-	544.360	160.106	-	-	1.729.142
115	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	7	4.085.072	846.988	-	-	141.165	-	-	988.152
116	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir (terpencil)	7	4.085.072	846.988	-	395.261	141.165	-	-	1.383.413
117	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir (sangat terpencil)	7	4.085.072	846.988	-	592.891	141.165	-	-	1.581.044
118	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6	3.549.880	736.022	-	-	122.670	-	-	858.693
119	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil (terpencil)	6	3.549.880	736.022	-	318.943	122.670	-	-	1.177.636
120	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil (sangat terpencil)	6	3.549.880	736.022	-	613.352	122.670	-	-	1.472.045

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula	5	2.960.491	716.124	-	-	102.303	-	-	818.427
122	Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula (terpencil)	5	2.960.491	716.124	-	409.214	102.303	-	-	1.227.641
123	Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula (sangat terpencil)	5	2.960.491	716.124	-	511.517	102.303	-	-	1.329.944
124	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	7.618.323	1.904.581	-	-	-	-	-	1.904.581
125	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya (terpencil)	11	7.618.323	1.904.581	-	199.201	-	-	-	2.103.782
126	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya (sangat terpencil)	11	7.618.323	1.904.581	-	398.402	-	-	-	2.302.983
127	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	5.764.552	1.792.810	-	-	-	-	-	1.792.810
128	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda (terpencil)	9	5.764.552	1.792.810	-	199.201	-	-	-	1.992.011
129	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda (sangat terpencil)	9	5.764.552	1.792.810	-	398.402	-	-	-	2.191.212
130	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	4.633.197	1.344.888	-	-	-	-	-	1.344.888
131	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama (terpencil)	8	4.633.197	1.344.888	-	224.148	-	-	-	1.569.036
132	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama (sangat terpencil)	8	4.633.197	1.344.888	-	416.275	-	-	-	1.761.163
133	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil	7	4.085.072	1.185.783	-	-	-	-	-	1.185.783
134	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil (terpencil)	7	4.085.072	1.185.783	-	338.795	-	-	-	1.524.578

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil (sangat terampil)	7	4.085.072	1.185.783	-	522.309	-	-	-	1.708.092
136	Radiografer Terampil	6	3.549.880	736.022	-	-	122.670	-	-	858.693
137	Radiografer Mahir	7	4.085.072	846.988	-	-	141.165	-	-	988.152
138	Radiografer Penyelia	8	4.633.197	1.024.677	-	-	160.106	-	-	1.184.783
139	Sanitarian Madya	11	7.618.323	1.257.023	-	-	-	-	-	1.257.023
140	Sanitarian Madya (terampil)	11	7.618.323	1.257.023	-	398.402	-	-	-	1.655.425
141	Sanitarian Madya (sangat terampil)	11	7.618.323	1.257.023	-	597.603	-	-	-	1.854.627
142	Sanitarian Muda	9	5.764.552	1.155.366	-	-	-	-	-	1.155.366
143	Sanitarian Muda (terampil)	9	5.764.552	1.155.366	-	398.402	-	-	-	1.553.769
144	Sanitarian Muda (sangat terampil)	9	5.764.552	1.155.366	-	597.603	-	-	-	1.752.970
145	Sanitarian Pertama, Sanitarian Penyelia	8	4.633.197	1.056.698	-	-	-	-	-	1.056.698
146	Sanitarian Pertama (terampil)	8	4.633.197	1.056.698	-	384.254	-	-	-	1.440.952
147	Sanitarian Pertama (sangat terampil)	8	4.633.197	1.056.698	-	544.360	-	-	-	1.601.058
148	Sanitarian Mahir	7	4.085.072	988.152	-	-	-	-	-	988.152

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	Sanitarian Mahir (terpencil)	7	4.085.072	988.152	-	367.028	-	-	-	1.355.180
150	Sanitarian Mahir (sangat terpencil)	7	4.085.072	988.152	-	564.658	-	-	-	1.552.811
151	Sanitarian Terampil	6	3.549.880	834.159	-	-	-	-	-	834.159
152	Sanitarian Terampil (terpencil)	6	3.549.880	834.159	-	368.011	-	-	-	1.202.170
153	Sanitarian Terampil (sangat terpencil)	6	3.549.880	834.159	-	662.420	-	-	-	1.496.579
154	Sanitarian Pemula	5	2.960.491	818.427	-	-	-	-	-	818.427
155	Sanitarian Pemula (terpencil)	5	2.960.491	818.427	-	347.832	-	-	-	1.166.259
156	Sanitarian Pemula (sangat terpencil)	5	2.960.491	818.427	-	634.281	-	-	-	1.452.708
157	Teknisi Elektromedis Mahir	7	4.085.072	1.552.811	-	-	-	-	-	1.552.811
158	Teknisi Elektromedis terampil	6	3.549.880	1.226.704	-	-	-	-	-	1.226.704
159	Perekam Medis Terampil	6	3.549.880	834.159	-	-	-	-	-	834.159
160	Penyuluh Pertanian Madya	10	6.626.771	2.152.563	-	-	-	-	-	2.152.563
161	Penyuluh Pertanian Madya (terpencil)	10	6.626.771	2.152.563	-	137.398	-	-	-	2.289.961
162	Penyuluh Pertanian Madya (sangat terpencil)	10	6.626.771	2.152.563	-	228.996	-	-	-	2.381.559
163	Penyuluh Pertanian Muda	9	5.764.552	1.752.970	-	-	-	-	-	1.752.970

RPV

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Penyuluh Pertanian Muda (terpencil)	9	5.764.552	1.752.970	-	119.521	-	-	-	1.872.490
165	Penyuluh Pertanian Muda (sangat terpencil)	9	5.764.552	1.752.970	-	199.201	-	-	-	1.952.171
166	Penyuluh Pertanian Pertama, Penyuluh pertanian penyelia	8	4.633.197	1.729.142	-	-	-	-	-	1.729.142
167	Penyuluh Pertanian Pertama, Penyuluh pertanian penyelia (terpencil)	8	4.633.197	1.729.142	-	160.106	-	-	-	1.889.248
168	Penyuluh Pertanian Pertama, Penyuluh pertanian penyelia (sangat terpencil)	8	4.633.197	1.729.142	-	256.169	-	-	-	1.985.311
169	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	7	4.085.072	1.722.208	-	-	-	-	-	1.722.208
170	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan (terpencil)	7	4.085.072	1.722.208	-	141.165	-	-	-	1.863.373
171	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan (sangat terpencil)	7	4.085.072	1.722.208	-	225.863	-	-	-	1.948.071
172	Penyuluh Pertanian Pelaksana	6	3.549.880	1.349.374	-	-	-	-	-	1.349.374
173	Penyuluh Pertanian Pelaksana (terpencil)	6	3.549.880	1.349.374	-	122.670	-	-	-	1.472.045
174	Penyuluh Pertanian Pelaksana (sangat terpencil)	6	3.549.880	1.349.374	-	196.273	-	-	-	1.545.647
175	Penyuluh Pertanian Pemula	5	2.960.491	1.329.944	-	-	-	-	-	1.329.944
176	Penyuluh Pertanian Pemula (terpencil)	5	2.960.491	1.329.944	-	163.685	-	-	-	1.493.630
177	Penyuluh Pertanian Pemula (sangat terpencil)	5	2.960.491	1.329.944	-	204.607	-	-	-	1.534.551

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	Penyuluh Peternakan Pertama	8	4.633.197	1.761.163	-	-	-	-	-	1.761.163
179	Penyuluh Peternakan Pertama (terpencil)	8	4.633.197	1.761.163	-	128.085	-	-	-	1.889.248
180	Penyuluh Peternakan Pertama (sangat terpencil)	8	4.633.197	1.761.163	-	192.127	-	-	-	1.953.290
181	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8	4.633.197	2.305.523	-	-	1.601.058	-	-	3.906.580
182	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	10	6.626.771	2.518.957	-	-	2.289.961	-	-	4.808.918
183	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	12	9.853.934	2.928.426	-	-	3.405.147	-	-	6.333.573
184	Analisis Kepegawaian/Analisis Sumber Daya Aparatur Manusia Ahli Pertama	8	4.633.197	2.081.375	-	-	-	-	-	2.081.375
185	Penata Ruang Ahli Pertama	8	4.633.197	2.081.375	-	-	-	-	-	2.081.375
186	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	8	4.633.197	2.081.375	-	-	-	-	-	2.081.375
187	Polisi Pamong Praja Terampil	6	3.549.880	1.594.715	-	-	-	-	-	1.594.715
188	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	7	4.085.072							
189	Widyaswara Ahli Pertama	8	4.633.197	2.081.375	-	-	-	-	-	2.081.375
190	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	4.633.197	2.081.375	-	-	-	-	-	2.081.375
191	Penerjemah Ahli Pertama	8	4.633.197	2.081.375	-	-	-	-	-	2.081.375

RP

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	4.633.197	2.081.375	-	-	-	-	-	2.081.375
193	Pranata Komputer Ahli Terampil	6	3.549.880	1.594.715	-	-	-	-	-	1.594.715
194	Pengawas Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	8	4.633.197	2.081.375	-	-	-	-	-	2.081.375
195	Pemadam Kebakaran Pemula	5	2.960.491	1.329.944	-	-	-	-	-	1.329.944
196	Perawat Penyelia Yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Pegatan 1 Kecamatan Katingan Kuala	8	4.633.197	3.522.327	-	640.423	640.423	-	-	4.803.173
197	Perawat Penyelia yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas Pegatan 1 Kecamatan Katingan Kuala	8	4.633.197	3.202.115	-	-	480.317	-	-	3.682.432
198	Perawat Penyelia Yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Pagatan 2 Kecamatan Katingan Kuala	8	4.633.197	3.522.327	-	640.423	640.423	-	-	4.803.173
199	Perawat Penyelia Tugas Tambahan sebagai Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas Pegatan 2 Kecamatan Katingan Kuala	8	4.633.197	3.202.115	-	-	480.317	-	-	3.682.432
200	Perawat Penyelia Yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Mendawai Kecamatan Mendawai	8	4.633.197	3.522.327	-	640.423	640.423	-	-	4.803.173
201	Sanitarian Penyelia Tugas Tambahan sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Mendawai Kecamatan Mendawai	8	4.633.197	3.202.115	-	-	480.317	-	-	3.682.432
202	Dokter Ahli Muda Yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Baun Bango Kecamatan Kamipang	10	6.626.771	5.037.914	-	915.984	1.831.969	-	-	7.785.867
203	Perawat Penyelia Tugas Tambahan sebagai Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas Banun Bango Kecamatan Kamipang	8	4.633.197	3.202.115	-	-	480.317	-	-	3.682.432
204	Dokter Ahli Muda Yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan	10	6.626.771	5.037.914	-	-	2.060.965	-	-	7.098.879
205	Perawat Penyelia Yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Tata Usaha Puskesmas Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan	8	4.633.197	3.202.115	-	-	-	-	-	3.202.115

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	Dokter Ahli Madya Yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Kereng Pangi Kecamatan Katingan Hilir	12	9.853.934	5.124.046	-	-	2.266.405	-	-	7.390.451
207	Bidan Penyelia Tugas Tambahan sebagai Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas Kereng Pangi Kecamatan Katingan Hilir	8	4.633.197	3.202.115	-	-	-	-	-	3.202.115
208	Dokter Ahli Muda Yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Kasongan Kecamatan Katingan Hilir	10	6.626.771	5.037.914	-	-	2.060.965	-	-	7.098.879
209	Penyuluh Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda Tugas Tambahan sebagai Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas Kasongan Kecamatan Katingan Hilir	9	5.764.552	3.984.022	-	-	-	-	-	3.984.022
210	Dokter Ahli Muda Yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Kasongan II Kecamatan Katingan Hilir	10	6.626.771	5.037.914	-	-	2.060.965	-	-	7.098.879
211	Perawat Penyelia Yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Tata Usaha Puskesmas Kasongan II Kecamatan Katingan Hilir	8	4.633.197	3.202.115	-	-	-	-	-	3.202.115
212	Dokter Ahli Muda Yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing	10	6.626.771	5.037.914	-	-	2.060.965	-	-	7.098.879
213	Bidan Penyelia Tugas Tambahan sebagai Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing	8	4.633.197	3.202.115	-	-	-	-	-	3.202.115
214	Dokter Ahli Muda Yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Buntut Bali Kecamatan Pulau Malan	10	6.626.771	5.037.914	-	-	2.060.965	-	-	7.098.879
215	Perawat Penyelia Tugas Tambahan sebagai Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas Buntut Bali Kecamatan Pulau Malan	8	4.633.197	3.202.115	-	-	-	-	-	3.202.115
216	Pranata Lab Kesehatan Ahli Muda Yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Tumbang Samba Kecamatan Katingan Tengah	10	6.626.771	5.037.914	-	-	915.984	-	-	5.953.899
217	Penyuluh Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda Tugas Tambahan sebagai Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas Tumbang Samba Kecamatan Katingan Tengah	9	5.764.552	3.984.022	-	-	-	-	-	3.984.022
218	Dokter Ahli Muda Yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei	10	6.626.771	5.037.914	-	915.984	2.060.965	-	-	8.014.864
219	Perawat Penyelia Tugas Tambahan sebagai Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei	8	4.633.197	3.202.115	-	-	480.317	-	-	3.682.432

FDK

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	Perawat Penyelia Yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Tumbang Baraoi Kecamatan Petak Malai	8	4.633.197	3.522.327	-	640.423	640.423	-	-	4.803.173
221	Asisten Apoteker Mahir Yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Tumbang Baraoi Kecamatan Petak Malai	7	4.085.072	2.823.292	-	-	423.494	-	-	3.246.786
222	Perawat Penyelia Yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Tumbang Hiran Kecamatan Marikit	8	4.633.197	3.522.327	-	640.423	640.423	-	-	4.803.173
223	Perawat Mahir Yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Tata Usaha Puskesmas Tumbang Hiran Kecamatan Marikit	7	4.085.072	2.823.292	-	-	423.494	-	-	3.246.786
224	Perawat Ahli Muda yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Sanamang Kecamatan Katingan Hulu	9	5.764.552	4.382.424	-	796.804	796.804	-	-	5.976.033
225	Perawat Penyelia yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas Sanamang Kecamatan Katingan Hulu	8	4.633.197	3.202.115	-	-	480.317	-	-	3.682.432
226	Perawat Terampil yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Kajamei Kecamatan Bukit Raya	6	3.549.880	2.697.909	-	640.423	640.423	-	-	3.978.755
227	Bidan Penyelia yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas Kajamei Kecamatan Bukit Raya	8	4.633.197	3.202.115	-	-	480.317	-	-	3.682.432
228	Guru Pertama yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	8	4.633.197	1.364.741	-	-	-	-	-	1.364.741
229	Guru Pertama (terpencil) yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	8	4.633.197	1.364.741	-	300.000	-	-	-	1.664.741
230	Guru Pertama (sangat terpencil) yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	8	4.633.197	1.364.741	-	500.000	-	-	-	1.864.741
231	Guru Muda yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	9	5.764.552	1.376.878	-	-	-	-	-	1.376.878
232	Guru Muda (Terpencil) yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	9	5.764.552	1.376.878	-	300.000	-	-	-	1.676.878
233	Guru Muda (Sangat Terpencil) yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	9	5.764.552	1.376.878	-	500.000	-	-	-	1.876.878

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	Guru Madya yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	11	7.618.323	1.447.932	-	-	-	-	-	1.447.932
235	Guru Madya (Terpencil) yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	11	7.618.323	1.447.932	-	300.000	-	-	-	1.747.932
236	Guru Madya (Sangat Terpencil) yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	11	7.618.323	1.447.932	-	500.000	-	-	-	1.947.932



Handwritten mark or signature in blue ink at the bottom right corner of the page.

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 10 TAHUN 2024
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN JABATAN PENGAWAS	NAMA JABATAN PENGAWAS SEBELUM PENYETARAAN	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah	8	4.633.197	4.126.886	-	-	-	-	-	4.126.886
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan	Sekretariat Daerah	8	4.633.197	4.126.886	-	-	-	-	-	4.126.886
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat	Sekretariat Daerah	8	4.633.197	4.126.886	-	-	-	-	-	4.126.886
4	Analisis Hukum Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan	Sekretariat Daerah	9	5.764.552	4.183.223	-	-	-	-	-	4.183.223
5	Analisis Hukum Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum	Sekretariat Daerah	9	5.764.552	4.183.223	-	-	-	-	-	4.183.223
6	Analisis Hukum Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi	Sekretariat Daerah	9	5.764.552	4.183.223	-	-	-	-	-	4.183.223
7	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Perekonomian	Sekretariat Daerah	8	4.633.197	4.126.886	-	-	-	-	-	4.126.886
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam	Sekretariat Daerah	8	4.633.197	4.126.886	-	-	-	-	-	4.126.886
9	Perencana Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	Sekretariat Daerah	8	4.633.197	4.126.886	-	-	-	-	-	4.126.886
10	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Pengendalian Program	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	8	4.633.197	4.126.886	-	-	-	-	-	4.126.886
11	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Sekretariat Daerah	8	4.633.197	4.126.886	-	-	-	-	-	4.126.886

KP

NO	NAMA JABATAN FUNSIONAL HASIL PENYETARAAN JABATAN PENGAJAS	NAMA JABATAN PENGAJAS SEBELUM PENYETARAAN	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah	9	5,764,552	4,183,223	-	-	-	-	-	4,183,223
13	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	8	4,633,197	4,126,886	-	-	-	-	-	4,126,886
14	Pustakawan Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Perpustakaan	Sekretariat Daerah	9	5,764,552	4,183,223	-	-	-	-	-	4,183,223
15	Arsiparis Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Arsip dan Dokumentasi	Sekretariat Daerah	9	5,764,552	4,183,223	-	-	-	-	-	4,183,223
16	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perpustakaan dan Arsip	Sekretariat Daerah	8	4,633,197	4,126,886	-	-	-	-	-	4,126,886
17	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	9	5,764,552	4,183,223	-	-	-	-	-	4,183,223
18	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual	Sekretariat Daerah	8	4,633,197	4,126,886	-	-	-	-	-	4,126,886
19	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial	Sekretariat Daerah	8	4,633,197	4,126,886	-	-	-	-	-	4,126,886
20	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD	Sekretariat Daerah	8	4,633,197	4,126,886	-	-	-	-	-	4,126,886
21	Perisalah Legislatif Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Persidangan, Risalah, Humas, Protokol dan Informasi Teknologi	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9	5,764,552	4,001,902	-	-	-	-	-	4,001,902
22	Perencana Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9	5,764,552	4,001,902	-	-	-	-	-	4,001,902
23	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9	5,764,552	4,001,902	-	-	-	-	-	4,001,902
24	Perancang Peraturan Perundangan - Undangan Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9	5,764,552	4,001,902	-	-	-	-	-	4,001,902
25	Perencana Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9	5,764,552	4,000,157	-	-	-	-	-	4,000,157
26	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117

MR

NO	NAMA JABATAN FUNSIONAL HASIL PENYETARAAN JABATAN PENGAWAS	NAMA JABATAN PENGAWAS SEBELUM PENYETARAAN	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	REBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
28	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Lahan dan Irigasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
29	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda	Kepala Seksi Pupuk, Pesticida, Alat dan Mesin Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9	5,764,552	4,000,157	-	-	-	-	-	4,000,157
30	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Kepala Seksi Penyuluhan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
31	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	Kepala Seksi Produksi Tanaman dan Hortikultura	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
32	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
33	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
34	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Produksi Perkebunan dan Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
35	Medik Veteriner Ahli Muda	Kepala Seksi Perbenihan, Perlindungan Perkebunan dan Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
36	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
37	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
38	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Kepala Seksi Produksi Perikanan	Dinas Perhubungan dan Perikanan	9	5,764,552	4,000,157	-	-	-	-	-	4,000,157
39	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Ikan	Dinas Perhubungan dan Perikanan	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
40	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perhubungan dan Perikanan	9	5,764,552	4,000,157	-	-	-	-	-	4,000,157
41	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Bina Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117

KR

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN JABATAN PENGAWAS	NAMA JABATAN PENGAWAS SEBELUM PENYETARAAN	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
43	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Kepala Seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
44	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Bina Perencanaan dan Pembangunan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
45	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
46	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Bina Pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
47	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Bina Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9	5,764,552	4,000,157	-	-	-	-	-	4,000,157
48	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Bina Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
49	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Bina Pembangunan Kawasan dan Kerjasama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9	5,764,552	4,002,349	-	-	-	-	-	4,002,349
50	Perencana Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	4,633,197	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000
51	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan Partisipasi Organisasi Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
52	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Partisipasi Swasta, Dunia Usaha dan Media	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
53	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Kesetaraan Gender Bidang Sosial dan Partisipasi Organisasi Keagamaan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117

KR

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN JABATAN PENCAWAS	NAMA JABATAN PENGAWAS SEBELUM PENYETARAAN	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEHAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan, Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Situasi Darurat/Khusus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
55	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak dan Pengembangan Kota Layak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
56	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak Bidang Ekonomi, Hukum dan Partisipasi Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
57	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Kepala Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
58	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
59	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Kepala Seksi Pemberdayaan, Penyuluhan, Pergerakan dan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
60	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Kepala Seksi Data, Informasi dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
61	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Kepala Seksi Remaja, Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Kecil Berkualitas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN JABATAN PENGAWAS	NAMA JABATAN PENGAWAS SEBELUM PENYETARAAN	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Seksi Pengendalian, Pendistribusian Alat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
63	Perencana Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8	4,633,197	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000
64	Perencana Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah,	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8	4,633,197	4,963,278	-	-	-	-	-	4,963,278
65	Perencana Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi Sumber Daya Mineral,	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8	4,633,197	4,963,278	-	-	-	-	-	4,963,278
66	Perencana Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan,	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8	4,633,197	4,963,278	-	-	-	-	-	4,963,278
67	Perencana Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8	4,633,197	4,963,278	-	-	-	-	-	4,963,278
68	Perencana Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Sosial, Komunikasi dan Informatika, Trantubum	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8	4,633,197	4,963,278	-	-	-	-	-	4,963,278
69	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Sosial dan Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8	4,633,197	4,963,278	-	-	-	-	-	4,963,278
70	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8	4,633,197	4,963,278	-	-	-	-	-	4,963,278
71	Perencana Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8	4,633,197	4,963,278	-	-	-	-	-	4,963,278
72	Perencana Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8	4,633,197	4,963,278	-	-	-	-	-	4,963,278
73	Perencana Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8	4,633,197	4,963,278	-	-	-	-	-	4,963,278
74	Perencana Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Perpustakaan dan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8	4,633,197	4,963,278	-	-	-	-	-	4,963,278
75	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	9	5,764,552	4,980,024	-	-	-	-	-	4,980,024

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN JARATAN PENGAWAS	NAMA JABATAN PENGAWAS SEBELUM PENYETARAAN	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	4,633,197	4,886,107	-	-	-	-	-	4,886,107
77	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Pembinaan, Disiplin dan Pengembangan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	4,633,197	4,886,107	-	-	-	-	-	4,886,107
78	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	4,633,197	4,886,107	-	-	-	-	-	4,886,107
79	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Mutasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	4,633,197	4,161,148	-	-	-	-	-	4,161,148
80	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	4,633,197	4,160,508	-	-	-	-	-	4,160,508
81	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	5,764,552	4,203,940	-	-	-	-	-	4,203,940
82	Perencana Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	5,764,552	4,000,157	-	-	-	-	-	4,000,157
83	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
84	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
85	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
86	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
87	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
88	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
89	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
90	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN JABATAN PENGAWAS	NAMA JABATAN PENGAWAS SEBELUM PENYETARAAN	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
92	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
93	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
94	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Pelaporan Layanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
95	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Identitas Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	4,633,197	4,002,612	-	-	-	-	-	4,002,612
96	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	4,633,197	4,002,612	-	-	-	-	-	4,002,612
97	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	4,633,197	4,002,612	-	-	-	-	-	4,002,612
98	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	4,633,197	4,002,612	-	-	-	-	-	4,002,612
99	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	4,633,197	4,002,612	-	-	-	-	-	4,002,612
100	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	5,764,552	4,039,998	-	-	-	-	-	4,039,998
101	Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	4,633,197	4,002,612	-	-	-	-	-	4,002,612
102	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	5,764,552	4,039,998	-	-	-	-	-	4,039,998
103	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	4,633,197	4,002,612	-	-	-	-	-	4,002,612
104	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Dinas Kesehatan	9	5,764,552	4,000,755	-	-	-	-	-	4,000,755
105	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	8	4,633,197	4,000,402	-	-	-	-	-	4,000,402

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN JABATAN PENGAWAS	NAMA JABATAN PENGAWAS SEBELUM PENYETARAAN	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	9	5,764,552	4,000,755	-	-	-	-	-	4,000,755
107	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	Dinas Kesehatan	8	4,633,197	4,000,402	-	-	-	-	-	4,000,402
108	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Dinas Kesehatan	9	5,764,552	4,000,755	-	-	-	-	-	4,000,755
109	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	9	5,764,552	4,000,755	-	-	-	-	-	4,000,755
110	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	9	5,764,552	4,000,755	-	-	-	-	-	4,000,755
111	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	9	5,764,552	4,000,755	-	-	-	-	-	4,000,755
112	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Dinas Kesehatan	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
113	Perencana Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	9	5,764,552	4,000,157	-	-	-	-	-	4,000,157
114	Pamong Budaya Ahli Muda	Kepala Seksi Kesenian dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
115	Pamong Budaya Ahli Muda	Kepala Seksi Sejarah, Film dan Pelestarian Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
116	Pamong Budaya Ahli Muda	Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Diplomasi Budaya	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
117	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	Kepala Seksi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
118	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata dan Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
119	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi, Strategi Pemasaran dan Analisis Data Pasar	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
120	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN JABATAN PENGAWAS	NAMA JABATAN PENGAWAS SEBELUM PENYETARAAN	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANOKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Kewirausahaan dan Tenaga Kepemudaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
122	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Olahraga Pendidikan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
123	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Olahraga Rekreasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
124	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Olahraga Prestasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
125	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Pemuda, Kreativitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
126	Perencana Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi	Badan Keuangan dan Aset Daerah	8	4.633.197	4.000.000	-	-	-	-	-	4.000.000
127	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan Investasi	Badan Keuangan dan Aset Daerah	9	5.764.552	5.199.149	-	-	-	-	-	5.199.149
128	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Akuntansi Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	8	4.633.197	4.547.003	-	-	-	-	-	4.547.003
129	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Berang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	8	4.633.197	4.547.003	-	-	-	-	-	4.547.003
130	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak dan Retribusi	Badan Keuangan dan Aset Daerah	8	4.633.197	4.547.003	-	-	-	-	-	4.547.003
131	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan Pajak dan Retribusi	Badan Keuangan dan Aset Daerah	8	4.633.197	4.547.003	-	-	-	-	-	4.547.003
132	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	8	4.633.197	5.219.447	-	-	-	-	-	5.219.447
133	Perencana Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi	Dinas Pendidikan	9	5.764.552	4.518.080	-	-	-	-	-	4.518.080
134	Widyaprada Ahli Muda	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Non Formal	Dinas Pendidikan	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
135	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117

KP

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN JABATAN PENGAWAS	NAMA JABATAN PENGAWAS SEBELUM PENYETARAAN	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
136	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah	Dinas Pendidikan	9	5,764,552	4,000,157	-	-	-	-	-	4,000,157
137	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah	Dinas Pendidikan	9	5,764,552	4,000,157	-	-	-	-	-	4,000,157
138	Perencana Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8	4,633,197	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000
139	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi E-Government	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8	4,633,197	4,128,202	-	-	-	-	-	4,128,202
140	Pranata Komputer Ahli Muda	Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8	4,633,197	4,128,202	-	-	-	-	-	4,128,202
141	Pranata Humas Ahli Muda	Kepala Seksi Pengendalian Informasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
142	Pranata Humas Ahli Muda	Kepala Seksi Media Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
143	Pranata Humas Ahli Muda	Kepala Seksi Layanan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8	4,633,197	4,128,202	-	-	-	-	-	4,128,202
144	Pranata Humas Ahli Muda	Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8	4,633,197	4,128,202	-	-	-	-	-	4,128,202
145	Manggala Informatika Ahli Muda	Kepala Seksi Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	9	5,764,552	4,000,157	-	-	-	-	-	4,000,157
146	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Operasional Pengamanan Sandi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
147	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
148	Pranata Humas Ahli Muda	Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
149	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Telekomunikasi dan Keamanan Teknologi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
150	Pranata Humas Ahli Muda	Kepala Seksi Kehumasan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN JABATAN PENGAWAS	NAMA JABATAN PENGAWAS SEBELUM PENYETARAAN	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
151	Perencana Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	8	4,633,197	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000
152	Pengawas Koperasi Ahli Muda	Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
153	Pengawas Koperasi Ahli Muda	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
154	Pengawas Koperasi Ahli Muda	Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
155	Pengawas Perdagangan	Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
156	Pengawas Perdagangan	Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
157	Pengawas Perdagangan	Kepala Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
158	Penera Ahli Muda	Kepala Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
159	Penera Ahli Muda	Kepala Seksi Bina Sumber Daya Manusia	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
160	Pengawas Kemetrollogian Ahli Muda	Kepala Seksi Pengawasan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
161	Pembina Industri Ahli Muda	Kepala Seksi Industri Kreatif	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
162	Pembina Industri Ahli Muda	Kepala Seksi Industri Agro dan Kimia	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
163	Pembina Industri Ahli Muda	Kepala Seksi Industri Logam Elektronik dan Aneka	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
164	Teknik Pengairan Ahli Muda	Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	9	5,764,552	4,000,157	-	-	-	-	-	4,000,157
165	Teknik Pengairan Ahli Muda	Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	8	4,633,197	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN JABATAN PENGAWAS	NAMA JABATAN PENGAWAS SEBELUM PENYETARAAN	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	Teknik Pengairan Ahli Muda	Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	8	4.633.197	4.000.000	-	-	-	-	-	4.000.000
167	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	9	5.764.552	4.000.157	-	-	-	-	-	4.000.157
168	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	9	5.764.552	4.000.157	-	-	-	-	-	4.000.157
169	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	9	5.764.552	4.000.157	-	-	-	-	-	4.000.157
170	Penata Ruang Ahli Muda	Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	9	5.764.552	4.000.157	-	-	-	-	-	4.000.157
171	Penata Ruang Ahli Muda	Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	8	4.633.197	4.000.000	-	-	-	-	-	4.000.000
172	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Kepala Seksi Jasa Konstruksi, Peralatan dan Perbekalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	8	4.633.197	4.000.000	-	-	-	-	-	4.000.000
173	Perencana Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	8	4.633.197	4.000.000	-	-	-	-	-	4.000.000
174	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Kepala Seksi Pendataan, Perencanaan dan Evaluasi Perumahan dan Evaluasi	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
175	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Kepala Seksi Penyediaan dan Pembinaan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan	9	5.764.552	4.000.157	-	-	-	-	-	4.000.157
176	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Penyediaan dan Penataan Bangunan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan	9	5.764.552	4.000.157	-	-	-	-	-	4.000.157
177	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan	9	5.764.552	4.000.157	-	-	-	-	-	4.000.157
178	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Kepala Seksi Pelaksanaan Kawasan Permukiman dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan	9	5.764.552	4.000.157	-	-	-	-	-	4.000.157
179	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
180	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Kepala Seksi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan	9	5.764.552	4.000.157	-	-	-	-	-	4.000.157

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN JABATAN PENGAWAS	NAMA JABATAN PENGAWAS SEBELUM PENYETARAAN	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Penataan, Pengaturan, Pengendalian dan Pemberdayaan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
182	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Pelayanan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
183	Pekerja Sosial Ahli Muda	Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Dinas Sosial	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
184	Pekerja Sosial Ahli Muda	Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga	Dinas Sosial	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
185	Pekerja Sosial Ahli Muda	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Dinas Sosial	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
186	Pekerja Sosial Ahli Muda	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
187	Pekerja Sosial Ahli Muda	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	Dinas Sosial	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
188	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Retorasi Sosial	Dinas Sosial	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
189	Pekerja Sosial Ahli Muda	Kepala Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan	Dinas Sosial	9	5.764.552	4.000.157	-	-	-	-	-	4.000.157
190	Pekerja Sosial Ahli Muda	Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Dinas Sosial	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
191	Pekerja Sosial Ahli Muda	Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Dinas Sosial	9	5.764.552	4.000.157	-	-	-	-	-	4.000.157
192	Instruktur Ahli Muda	Kepala Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	9	5.764.552	4.000.157	-	-	-	-	-	4.000.157
193	Instruktur Ahli Muda	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
194	Pengantar Kerja Ahli Muda	Kepala Seksi Informasi Pasar dan Sertifikasi	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	9	5.764.552	4.000.157	-	-	-	-	-	4.000.157

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN JABATAN PENGAWAS	NAMA JABATAN PENGAWAS SEBELUM PENYETARAAN	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196	Pengawas Tenaga Kerja Ahli Muda	Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
197	Pengawas Tenaga Kerja Ahli Muda	Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	9	5.764.552	4.000.157	-	-	-	-	-	4.000.157
198	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Perencanaan Potensi Kawasan, Pertanahan dan Kelayakan Permukiman	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
199	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Perpindahan, Persebaran Penduduk dan Pengembangan Masyarakat	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
200	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Seksi Pengembangan Usaha, Sarana Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
201	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Kepala Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Dinas Lingkungan Hidup	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
202	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
203	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
204	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Kepala Seksi Pengurangan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
205	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	9	5.764.552	4.000.157	-	-	-	-	-	4.000.157
206	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Dinas Lingkungan Hidup	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
207	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
208	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	9	5.764.552	4.000.157	-	-	-	-	-	4.000.157

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN JABATAN PENGAWAS	NAMA JABATAN PENGAWAS SEBELUM PENYETARAAN	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
209	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	9	5.764.552	4.000.157	-	-	-	-	-	4.000.157
210	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Kepala Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
211	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	Kepala Seksi Penegak Hukum	Dinas Lingkungan Hidup	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
212	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
213	Perencana Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi	Dinas Lingkungan Hidup	9	5.764.552	4.000.157	-	-	-	-	-	4.000.157
214	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Intelijen	Satuan Polisi Pamong Praja	9	5.764.552	4.000.157	-	-	-	-	-	4.000.157
215	Polisi Pamong Praja Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Penyuluhan	Satuan Polisi Pamong Praja	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
216	Polisi Pamong Praja Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Satuan Linmas	Satuan Polisi Pamong Praja	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
217	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Pengendalian	Satuan Polisi Pamong Praja	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
218	Perencana Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	5.764.552	4.000.157	-	-	-	-	-	4.000.157
219	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Kepala Seksi Pencegahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
220	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	5.764.552	4.000.157	-	-	-	-	-	4.000.157
221	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Kepala Seksi Kedaruratan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
222	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Kepala Seksi Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117
223	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Kepala Seksi Rehabilitasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	4.633.197	4.000.117	-	-	-	-	-	4.000.117

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN JABATAN PENGAWAS	NAMA JABATAN PENGAWAS SEBELUM PENYETARAAN	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
224	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Kepala Seksi Rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
225	Perencana Ahli Muda	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	5,764,552	4,000,157	-	-	-	-	-	4,000,157
226	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
227	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
228	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
229	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
230	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Politik dan Pemilu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	4,633,197	4,000,117	-	-	-	-	-	4,000,117
231	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Ormas dan Ketahanan Lembaga Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	5,764,552	4,000,157	-	-	-	-	-	4,000,157



MR

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 10 TAHUN 2024
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI JABATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

NO	NAMA JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	5	6	7	8	9	10	11
1	Guru Pertama	864,571						864,571
2	Guru Pertama (Terpencil)	1,164,571						1,164,571
3	Guru Pertama (Sangat Terpencil)	1,364,571						1,364,571
4	Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	1,000,000						1,000,000
5	Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Terampil (Sangat Terpencil)	834,159						834,159
6	Tenaga Sanitasi Lingkungan Pertama	1,000,000						1,000,000
7	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	834,159						834,159
8	Administrator Kesehatan Pertama	1,000,000						1,000,000
9	Apoteker Pertama	1,000,000						1,000,000
10	Apoteker Pertama (Sangat Terpencil)	1,000,000		500,000				1,500,000
11	Asisten Apoteker Terampil	736,022			122,670			858,693
12	Asisten Apoteker Terampil (Terpencil)	736,022		392,545	122,670			1,251,238
13	Asisten Apoteker Terampil (Sangat Terpencil)	736,022		490,682	122,670			1,349,374

NA

NO	NAMA JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	5	6	7	8	9	10	11
14	Ahli Pertama - Bidan	864,571			160,106			1,024,677
15	Ahli Pertama - Bidan (Sangat Terpencil)	864,571		576,381	160,106			1,601,058
16	Terampil - Bidan	736,022			122,670			858,693
17	Terampil - Bidan Terpencil	736,022		392,545	122,670			1,251,238
18	Terampil - Bidan Sangat Terpencil	736,022		490,682	122,670			1,349,374
19	Dokter Pertama Spesialis	3,984,022			4,382,424	30,000,000		38,366,446
20	Dokter Pertama	3,984,022			1,792,810			5,776,832
21	Dokter Pertama Terpencil	3,984,022		1,593,609	1,792,810			7,370,441
22	Dokter Pertama Sangat Terpencil	3,984,022		2,191,212	1,792,810			7,968,044
23	Ahli Pertama - Entomolog Kesehatan	1,000,000						1,000,000
24	Ahli Pertama - Epidemiolog Kesehatan	1,000,000						1,000,000
25	Terampil - Epidemiolog Kesehatan	736,022			122,670			858,693
26	Ahli Pertama - Nutrisisionis	1,000,000						1,000,000
27	Terampil - Nutrisisionis	834,159						834,159
28	Terampil - Nutrisisionis Sangat Terpencil	834,159		637,886				1,472,045
29	Terampil - Okupasi Terapis	834,159						834,159
30	Ahli Pertama - Pembimbing Kesehatan Kerja	1,000,000						1,000,000
31	Ahli Pertama - Perawat	864,571			160,106			1,024,677

NO	NAMA JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	5	6	7	8	9	10	11
32	Ahli Pertama - Perawat Sangat Terampil	864,571		576,381	160,106			1,601,058
33	Terampil - Perawat	736,022			122,670			858,693
34	Terampil - Perawat Terampil	736,022		392,545	122,670			1,251,238
35	Terampil - Perawat Sangat Terampil	736,022		490,682	122,670			1,349,374
36	Ahli Pertama - Pranata Laboratorium Kesehatan	1,000,000						1,000,000
37	Terampil - Pranata Laboratorium Kesehatan	736,022						736,022
38	Terampil - Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	736,022		318,943	122,670			1,177,636
39	Terampil - Pranata Laboratorium Kesehatan Sangat Terampil	736,022		613,352	122,670			1,472,045
40	Terampil - Radiografer	736,022			122,670			858,693
41	Terampil - Teknisi Elektromedis	800,000						800,000
42	Ahli Pertama - Analis Hukum	1,000,000						1,000,000
43	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	1,000,000						1,000,000
44	Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	1,000,000						1,000,000
45	Ahli Pertama - Arsiparis	1,000,000						1,000,000
46	Ahli Pertama - Instruktur	1,000,000						1,000,000
47	Ahli Pertama - Pekerja Sosial	1,000,000						1,000,000
48	Ahli Pertama - Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman	1,000,000						1,000,000
49	Ahli Pertama - Penata Kelola Jalan Dan Jembatan	1,000,000						1,000,000

NO	NAMA JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	5	6	7	8	9	10	11
50	Ahli Pertama - Penata Kelola Penyehatan Lingkungan	1,000,000						1,000,000
51	Ahli Pertama - Penata Ruang	1,000,000						1,000,000
52	Ahli Pertama - Penera	1,000,000						1,000,000
53	Ahli Pertama - Pengawas Koperasi	1,000,000						1,000,000
54	Ahli Pertama - Pengawas Perdagangan	1,000,000						1,000,000
55	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1,000,000						1,000,000
56	Ahli Pertama - Pengelola Sumber Daya Air	1,000,000						1,000,000
57	Ahli Pertama - Penyuluh Hukum	1,000,000						1,000,000
58	Ahli Pertama - Penyuluh Pertanian	1,000,000						1,000,000
59	Ahli Pertama - Penyuluh Sosial	1,000,000						1,000,000
60	Ahli Pertama - Perencana	1,000,000						1,000,000
61	Ahli Pertama - Perisalah Legislatif	1,000,000						1,000,000
62	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	1,000,000						1,000,000
63	Ahli Pertama - Pranata Komputer	1,000,000						1,000,000
64	Ahli Pertama - Pustakawan	1,000,000						1,000,000
65	Ahli Pertama - Surveyor Pemetaan	1,000,000						1,000,000
66	Terampil - Penera	800,000						800,000
67	Terampil - Penguji Kendaraan Bermotor	800,000						800,000

NO	NAMA JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGA N OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	5	6	7	8	9	10	11
68	Terampil - Penyuluh Pertanian	800,000						800,000
69	Terampil - Pranata Komputer	800,000						800,000
70	Pemula - Penguji Kendaraan Bermotor	600,000						600,000
71	Pemula - Pemadam Kebakaran	750,000						750,000


 B U P A T I
 K A T I N G A N
 Pj. BUPATI KATINGAN,
 SAIFUL

K